



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**

TAHUN 2016 - 2021

LEMBAR PENETAPAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk memenuhi salah satu amanat dalam undang - undang tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai Rencana Tahunan. Muatan yang tertuang didalam Renstra ini adalah menyesuaikan visi dan misi Gubernur terpilih dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 diharapkan pelaksanaan Pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan terarah dan terkordinasi serta menjadi komitmen bersama sehingga akan dapat menjadi kontiuitas dan konsistensi program pembangunan sesuai dengan foku sasaran yang hendak dicapai.

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Oktober 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu,



H. Lierwan, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198512 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Atas berkat Rahmat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dan diselesaikan yang InsyaAllah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dibuat sehubungan dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah dan Perubahan Pagu Dana dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2016 - 2021 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dokumen resmi yang akan dipergunakan sebagai :

1. Bahan acuan bagi setiap Bidang/UPTD/Balai dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugasnya.
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja sisa tahun berjalan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.
3. Bahan untuk evaluasi keberhasilan/kegagalan kegiatan yang akan menjadi masukan pada perencanaan berikutnya.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu masih belum sempurna, tetapi dari segala kekurangan yang ada, kami harapkan saran - saran untuk perbaikan kearah penyempurnaan. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu,



H. Lierwan, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198512 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	35
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	40
3.2.1. Visi Gubernur Terpilih Tahun 2016 – 2021	40
3.2.2. Misi Gubernur Terpilih Tahun 2016 – 2021	42
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	50
3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kementerian Perindustrian R.I	50
3.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kementerian Perdagangan R.I	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	78
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	79
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRTEGI DAN KEBIJAKAN	82
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	82
4.1.1. Tujuan	82
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah	83
4.2. Strategi dan Kebijakan	83
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	87
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	92

BAB VII. PENUTUP	93
LAMPIRAN	94

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah dan Perubahan Pagu Dana dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen rencana stratejik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan Renstra Kementerian/ Lembaga terkait.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun, operasional RPJMD, sebagai dasar penyusunan Renja OPD, kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah yang juga merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja OPD melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dibuat sebagai langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja OPD karena Rencana Strategis merupakan kegiatan lanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu periode 2016-2021 adalah untuk menilai tingkat capaian target dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyesuaian dengan target provinsi (RPJMD 2016-2021), sebagai implementasi dari Visi Misi Kepala Daerah (Gubernur) terpilih. Selanjutnya hasil Renstra ini akan menjadi acuan untuk penyusunan :

1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
serta
2. Sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengikuti petunjuk dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

Pelaksanaan tugas dan pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pengelolaan dan fasilitasi dibidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari (dengan bagan struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran) :

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

b. Sekretaris

1. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pengarahan penyusunan program kerja sebagai berikut :

- Mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi
- Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
- Penyusunan rencana program kerja anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelayanan informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

3. Sekretaris membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

1. Tugas

Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian
- Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah
- Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pemutakhiran informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- Pengidentifikasain kebutuhan produk hukum daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Tugas

- Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran
- Mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan.
- Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

e. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Tugas

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

f. Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri

1. Tugas

- Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri
- Pengelolaan sistem informasi industri
- Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota
- Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha

kawasan industri di wilayah kabupaten/kota

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- Penyiapan bahan dan data berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri
- Penyiapan koordinasi penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri usaha industri kecil, menengah, kawasan yang usaha kawasan di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian industri agro.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan serta fasilitasi penanaman modal di bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penertiban izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- Menghadiri rapat-rapat teknis bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan masyarakat industri
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Agro dan pengembangan perwilayahan industri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

3. Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan membawahi

- Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- Kepala Seksi Ketahanan Industri

g. Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar

1. Tugas

- Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota penyebaran dan pembangunan industri, fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota, serta pengelolaan sistem informasi industri

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar.
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman Dan Bahan Penyegar
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

h. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri

1. Tugas

- Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya daerah kabupaten/kota

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan pengembangan wilayah industri
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi pengembangan wilayah industri
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi wilayah pengembangan wilayah industri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

i. Kepala Seksi Ketahanan Industri

1. Tugas

- Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar produk industri dan pengawasan pengendalian usaha industri besar di wilayah provinsi dan usaha kawasan industri yang lokasinya dalam kabupaten/kota

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan bidang ketahanan industri
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan ketahanan industri
- Menghadiri rapat teknis bidang ketahanan industri
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

j. Bidang Industri Kecil dan Menengah dan Pengembangan Akses Industri

1. Tugas

- Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, penyiapan koordinasi penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri, usaha industri kecil menengah, kawasan yang usaha kawasannya berada di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal dibidang bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri
- Menghadiri rapat-rapat industri kecil menengah dan pengembangan akses industri dan pemberdayaan masyarakat

industri

- Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

3. Kepala Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- b. Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- c. Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional

k. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan

1. Tugas

- Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta menyiapkan pengembangan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat daya dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri kecil

dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan

- Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan bidang industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

I. Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri

1. Tugas

- Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri
- Penyiapan pengembangan, peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri wilayah kabupaten kota

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber

daya industri

- Menghadiri rapat teknis bidang industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

m. Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional

1. Tugas

- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif, pemberian fasilitas dan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional
- Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional
- Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

n. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. Tugas

- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan

koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan

- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi
- Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah
- Memimpin pelaksanaan operasi pasar
- Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan
- Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota
- Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal dibidang industri penyiapan koordinasi penerbitan izin perdagangan dalam negeri
- Pelaksanaan kebijakan, penertiban izin, pengawasan standar produk perdagangan dalam negeri
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penertiban izin perdagangan dalam negeri
- Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal dibidang perdagangan dalam negeri
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin perdagangan dalam negeri
- Menghadiri rapat teknis bidang perdagangan dalam negeri
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan

Dalam Negeri

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kelapa dinas

3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi :

- Kepala Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

o. Kepala Seksi Usaha Logistik dan Saran Distribusi

1. Tugas

- Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi
- Melakukan pembinaan saran perdagangan dan sarana distribusi
- Melaksanakan pendataan dan pemantauan logistik
- Melaksanakan bimbingan perizinan dan rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri
- Mengevaluasai perizinan bidang perdagangan dalam negeri

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- Penyiapan bahn dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- Penyusunan konsep rencana pelaksanaan pembangunan saran distribusi perdagangan
- Pengumpulan data dan informasi kebutuhan pembangunan sarana distribusi perdagangan
- Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka pembangunan saran distribusi perdagangan
- Pelaksanaan analisis laporan pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- Pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- Pengevaluasian perizinan di bidang perdagangan dalam negeri
- Mengikuti rapat teknis bidang usaha logistik dan sarana distribusi
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logsitik dan Sarana Distribusi

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

p. Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi

1. Tugas

- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah provinsi, pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi
- Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi
- Pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- Penyusunan konsep data stok kebutuhan bahan pokok dan barang penting
- Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka penyusunan peta lokasi kebutuhan barang di daerah
- Penyusunan laporan dan peta lokasi stok kebutuhan barang pokok dan barang penting di daerah
- Pelaksanaan pemantauan dan pembuatan analisa laporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Penyusunan rencana dan kegiatan operasi pasar
- Pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan operasi pasar
- Penyusunan konsep pelaksanaan pemantauan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- Pelaksanaan promosi produk unggulan daerah
- Penyusunan laporan hasil pengawasan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- Pelaksanaan persiapan bahan bimbingan teknis bahan pokok dan barang penting
- Penyusunan laporan hasil kegiatan bahan pokok, barang penting

dan pupuk bersubsidi

- Mengikuti rapat teknis bidang bahan pokok dan promosi
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

q. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

1. Tugas

- Melakukan persiapan pengawasan barang dan jasa yang diawasi, pengawasan barang beredar dan atau jasa dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen
- Melakukan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta melakukan koordinasi antar instansi terkait di bidang perlindungan konsumen

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- Pengawasan barang beredar
- Perlindungan terhadap konsumen
- Persiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- Pelaksanan bimbingan teknsi pengawas barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- Mengikuti rapat teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
- Pengevaluasian pelaksanan tugas seksi perlindungan konsumen dan tertib niaga
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas perlindungan konsumen

dan tertib niaga

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

r. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Tugas

- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas
- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang ekspor impor
- Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor
- Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor
- Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor
- Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta rekomendasi kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perdagangan luar negeri
- Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor
- Pelaksanaan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- Penyebaran informasi perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi serta kerjasama pengembangan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri
- Pelaksanaan peningkatan pengembangan dan promosi pendataan
- Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perdagangan luar

negeri

- Mengikuti rapat teknis bidang perdagangan luar negeri
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi :

- Kepala Seksi Ekspor
- Kepala Seksi Impor
- Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor

s. Kepala Seksi Ekspor

1. Tugas

- Menyiapkan bimbingan teknis, pembinaan dunia usaha di bidang ekspor
- Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor
- Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor
- Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi ekspor
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang ekspor
- Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor
- Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang ekspor
- Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor
- Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor
- Mengikuti rapat teknis bidang ekspor
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi ekspor
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

t. Kepala Seksi Impor

1. Tugas

- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha dibidang impor
- Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomendasi di bidang impor
- Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor
- Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor
- Melaksanakan pendataan kerjasama dan pengevaluasi aktivitas impor

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi impor
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi impor
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria barang di bidang impor
- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang impor
- Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang impor
- Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor
- Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor
- Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang impor
- Mengikuti rapat teknis bidang impor
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi impor
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi impor
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

u. Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor

1. Tugas

- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Mengevaluasi dan menganalisa pengembangan komoditi ekspor
- Memantau peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan

pengembangan ekspor dibidang perdagangan luar negeri

- Meningkatkan promosi, citra dan pengembangan mutu komoditi ekspor

2. Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Pengevaluasain dan penganalisaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Pelaksanaan pemantauan, peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Mengikuti rapat teknis seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

v. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara profesional
2. Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
4. Seorang tenaga fungsional dipim pin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada dilingkungan dinas
5. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Sampai dengan pertengahan tahun 2014, sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1 Sarana yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUP I	KURANG	
1	MOBIL	7	-	-	-	√	7 UNIT
2	MOTOR	-	23	-	-	√	23 UNIT

Tabel. 2.2.2 Prasarana yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

NO	PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KE T
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	Gedung Kantor	5	1	√	-	-	
2	Rumah Dinas	-	5	√	-	-	
3	Meja	137	-	-	-	√	
4	Kursi Lipat	30	-	-	-	√	
5	Kursi Putar	80	-	-	-	√	
6	Kursi Tamu	15	-	-	-	√	
7	Komputer	24	-	-	-	√	
8	Printer	34	-	-	-	√	
9	Laptop/Notebook	14	-	-	-	√	
10	Air Condisioner	33	-	-	-	√	
11	Lemari	1	-	-	-	√	
12	Filling Cabinet	13	-	-	-	√	
13	Kursi Biro	-	-	-	-	-	
14	Kursi 1/2Biro	-	-	-	-	-	
15	Rak Buku	5	-	-	-	√	
16	Karpet	1	-	-	-	√	
17	Walpaper	2	-	-	-	√	
18	Mesin Sidik Jari	1	-	-	-	√	
19	Vacum Cleaner	1	-	-	-	√	
20	Vitrage, Gorden	2	-	-	-	√	
21	Handycam	1	-	-	-	√	

22	Proyektor	4	-	-	√	-	
23	Sound System	2	-	-	-	√	
24	Televisi	3	-	-	-	√	
25	Faximili	1	-	-	-	√	

Tabel. 2.2.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Total	Status		Pangkat/Golongan				Kualifikasi Pendidikan Terakhir									Pendidikan Pelatihan Struktural				K e t
	Isi	K o s o n g	I	II	III	IV	S D	S L T P	SL TA	D 1	D 2	D 3	S1	S 2	S 3	PI M I	PI M II	PI M III	PI M IV	
Eselon 1																				
Eselon 2	1					1							1				1			
Eselon 3	6				4	2							6					5		
Eselon 4	21				30	1							20	1						1 9
Fungsional Tertentu	30				26	4			7			1	18	4						
Fungsional Umum	42		1	8	33		1	7			7	33								
Total	100																			

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan selama satu dasawarsa terakhir telah mewarnai perjalanan perekonomian nasional dan tidak terlepas pula akibat yang ditimbulkan dari dampak terjadinya krisis moneter yang pernah melanda Bangsa Indonesia beberapa tahun silam, yang kemudian berdampak luas terhadap perekonomian daerah secara menyeluruh, utamanya sektor-sektor vital yang kemudian menekan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Namun demikian dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat, secara bertahap krisis yang dihadapi dapat dilalui dan secara perlahan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, dengan posisi tersebut hal

ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan

global yang semakin kompetitif, karena untuk produk-produk lokal yang masuk dalam pasar tersebut akan berhadapan langsung dengan produk-produk yang berasal dari berbagai negara, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pasar domestik. Oleh karenanya diperlukan strategi dalam mendorong industri perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki.

Dalam sisi perdagangan domestik, regional maupun internasional, Provinsi Bengkulu memiliki infrastruktur jalan dan pelabuhan yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menunjang kinerja ekspor-impor Provinsi Bengkulu terutama produk unggulan dan industri hasil pengolahan, seperti Karet, CPO, batubara dan produk hortikultura lainnya. Produk-produk hilir industri olahan tersebut, kedepan menjadi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar hasil produk perkebunan karet yang telah merambah pasar ekspor dunia, hal ini tentu ke depan perlu upaya secara kongkrit melalui kebijakan mendorong pengembangan industri hilir karet melalui berbagai program-program strategis.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian/penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau disebut dengan certificate of Origin (COO).
- b. SKA adalah surat keterangan asal barang yang menyatakan barang tersebut diolah dan atau di ekspor dari Indonesia. Tujuannya yaitu sebagai alat pendataan ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan preferensi atau pengurangan bea masuk di Negara tujuan.
- c. Pengujian Mutu Barang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dalam rangka menjamin kesesuaian mutu produk ekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor.

1. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yaitu :

Pelayanan permintaan SKA dilaksanakan setiap hari kerja dan terkadang hari liburpun dilakukan bila ada permintaan dengan waktu penerbitan SKA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima

permohonan dari eksportir (apabila data/informasi SKA benar). Pelayanan Permintaan pengujian mutu barang. Dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Barang (BPMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada setiap hari kerja.

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki sasaran pokok dalam pelayanannya, yaitu :

- 1) Pelayanan yang ditujukan kepada PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dalam kaitannya dengan sasaran pokok ini, pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan dinas merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS yang akan didukung dan tangani oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
- 2) Pelayanan yang ditujukan kepada aparatur/dinas/instansi yang menangani masalah Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu kepada PNS, dinas/instansi kabupaten/kota dan kecamatan merupakan bagian integral dari sistem manajemen dinas yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi dengan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 3) Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha baik di sektor industri maupun sektor perdagangan. Pelayanan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu kepada masyarakat sebagai pelaku usaha baik di sektor industri maupun sektor perdagangan.

Tingkat capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada RENSTRA tahun 2016-2021 berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan (**tabel 2.1 Terlampir**) dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan pelayananan melalui pelaksanaan program/ kegiatan (**tabel 2.2 terlampir**)

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Menyikapi hal demikian perlu

diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

1. KONDISI SAAT INI

- ✚ Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal.
- ✚ Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pedagang belum memadai.
- ✚ Tugas fungsional yang ada baik dibidang industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan.
- ✚ Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal.
- ✚ Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
- ✚ Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

- ✚ Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik.
- ✚ Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang).
- ✚ Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal.
- ✚ Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional.
- ✚ Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri dan perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu

sebagai berikut :

A. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah
- Potensi sumber daya alam yang memadai
- Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global
- Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Provinsi Bengkulu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
- Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (*Entrepreneurship*),
- Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,
- Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu dalam waktu-waktu lalu,
- Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

B. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

- ✚ Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang jelas, terarah dan baku.
- ✚ Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait.
- ✚ Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk

industri pengolahan

- ✚ Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan.

2. Kelemahan

- ✚ Keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri dan pedagang,
- ✚ Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah, Keterbatasan sarana/prasarana kelembagaan dilingkungan Dinas Perindag didalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan kepada para pedagang, pelaku eksportir daerah,
- ✚ Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum membumi/ memasyarakat sampai kepedesaan.

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengerucut menjadi 3 (lima) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan serta koordinator bidang Industri, (2) pengambil kebijakan/keputusan serta koordinator bidang Perdagangan, (3) Administrator. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. sebagai berikut :

- Sebagai pengambil kebijakan/keputusan dan koordinasi bidang Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pengembangan dibidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu, berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan di 10 kabupaten/kota.
- Sebagai pengambil kebijakan/keputusan dan koordinasi bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen di Provinsi Bengkulu, berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dinas yang membidangi perdagangan di 10 kabupaten/kota.
- Sebagai Administrator, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menjalankan administrasi antara lain pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum

Dalam kurun waktu tahun 2011 - 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung program pembangunan Gubernur Bengkulu dan program/kegiatan kementerian terkait,

namun masih ada terdapat beberapa program/kegiatan yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Renstra yang sebelumnya belum ada, hal ini untuk mengakomodir kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu dan kebijakan pusat. Serta yang paling utama adalah untuk menyelaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, adapun isu strategis dan perlu mendapat perhatian khusus pada periode 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur Bidang dan Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan, perencanaan dan pengembangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Beberapa kegiatan dari K/L yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan yang dialokasikan dari dana APBN berupa dana dekonsentrasi (DK) dan tugas pembantuan (TP) tidak didukung atau didampingi oleh dana APBD, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak banyak berdampak bagi pengembangan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu.
3. Sebagai dampak negatif otonomi daerah kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan kebijakan kabupaten/ kota setelah sinkronisasi berubah sesuai kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan masing-masing daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. VISI GUBERNUR TERPILIH TAHUN 2016 - 2021

Berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu, maka visi yang hendak dicapai tahun 2016-2021 adalah:

“MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan, dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan menjunjung tinggi martabat bangsa;

(4) meningkatnya daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselamatan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan, dan sebagainya.

3.2.2. MISI GUBERNUR TERPILIH TAHUN 2016 - 2021

Untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan antara lain:

1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Reformasi Tata Kelola Birokrasi.

Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Misi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja.

2) Mewujudkan Sistem Pengelolaan APBD Yang Akuntabel, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian; dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan (*empowering*) dan budaya kerja yang baik.

Utuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, diperlukan terobosan kebijakan fiskal daerah, yakni mengurangi belanja pegawai baik langsung ataupun tidak langsung, dan sekaligus memperbesar belanja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

3) Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar

3.1. Bidang Pendidikan

Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru.

3.2. Kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

4) Meningkatkan Dan Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar

Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; dan pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra- sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Misi ini harus menghasilkan dihapuskannya desa-desa yang tidak terjangkau pelayanan dasar pemerintah.

5) Meningkatkan Daya Saing Dan Iklim Investasi Daerah

Misi ini dapat dilakukan melalui: deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah.

6) Mewujudkan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa

Misi ini dapat dicapai melalui indikator-indikator reformasi mental dan pola pikir, seperti: menciptakan hubungan saling percaya (*trust*) antara aparatur dan masyarakat; menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada

hasil kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi.

7) Mewujudkan Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Misi ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

8) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Strategis Dan Berdaya Saing

8.1. Meningkatkan Kapasitas Pelabuhan Pulau Baai

Mengingat potensi peran pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen (curah):

pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat oneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain.

8.2. Meningkatkan Kapasitas Bandara Fatmawati

Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional;

menjadikan bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu lintas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah Sumatera bagian Selatan. Perluasan kapasitas bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain.

8.3. Infrastruktur Kelistrikan

Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provinsi-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

8.4. Peningkatan Akses Lintas Provinsi

Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

9) Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Yang Tangguh Dan Berdaya Saing

Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Bengkulu; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisata Bengkulu; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.

10) Mewujudkan Pembangunan Kemaritiman Yang Integratif Dan Berdaya Saing

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain (1) sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap

dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut, yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Bengkulu; (4) industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan. (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

11) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

12) Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (i) mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (ii) meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam; (iii) mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (iv) menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum; (v) meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (vi) menggali potensi sumberdaya yang terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah.

13) Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan Dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1) peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; (4) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan pengelola kegiatan kepemudaan; Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) pemanfaatan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis,

terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

14) Menanggulangi Kemiskinan Dan Ketertinggalan

Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Bengkulu terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Kebijakan dan program yang akan dilakukan antara lain:

- 14.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.
- 14.2. Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
- 14.3. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi Bengkulu.
- 14.4. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi berbiaya tinggi.
- 14.5. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pola-pola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya.

15) Meningkatkan Infrastruktur Dibidang Informasi Dan Telematika

Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang memungkinkan Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi global. Oleh karena itu, program-program lima tahun ke depan antara lain:

- Pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (*e-government*) dan pelayanan publik seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

- Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.

16) Meningkatkan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama

Bengkulu merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu, program yang akan dilakukan antara lain:

- ✚ Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dialog-dialog tersebut dipandang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan (*trust*) umat beragama.
- ✚ Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (*agents of change*) untuk membina umat.
- ✚ Menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

A. Industri Prioritas

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas Tahun 2015-2019

No	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1	<p>INDUSTRI PANGAN</p> <p>Industri Pengolahan Ikan: Ikan awet (beku, kering, asap) dan fillet, Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).</p> <p>Industri Bahan Penyegar: bubuk coklat, lemak coklat, makanan dan minuman dari coklat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao.</p> <p>Industri Pengolahan Minyak Nabati: Fortified cooking oil (natural dan non-natural), pangan fungsional berbasis minyak nabati.</p> <p>Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayur-sayuran: Buah/sayuran dalam kaleng, fruit/vegetable layer, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah.</p> <p>Industri Tepung: Pati dari biomassa limbah</p>	<p>Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai.</p> <p>Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan</p> <p>Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta</p>

	<p>pertanian, Pangan darurat</p> <p>Industri Gula Berbasis Tebu: Gula pasir, Gula cair, dan asam organik dari limbah industri gula.</p>	<p>bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan.</p> <p>Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil.</p> <p>Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.</p> <p>Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor.</p> <p>Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>
2	<p>INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN</p> <p>Industri Farmasi dan Kosmetik: Sediaan herbal, Garam farmasi, Golongan Cefalosporin, Amlodipine, Glucose Parmaceutical Grade (for infusion), Amoxicillin, Glimepiride, Parasetamol, Produk Kosmetik, Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)</p> <p>Industri Alat Uji dan Kedokteran: Produk disposable and consumables, Hospital</p>	<p>Industri Farmasi dan Kosmetik</p> <p>Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor;</p> <p>Mendorong peningkatan penggunaan</p>

	<p>Furniture, Implan Ortopedi, Electromedical devices, Diagnostic instrument, PACS (Picture Archiving and</p>	<p>produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah;</p> <p>Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik;</p> <p>Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku;</p> <p>Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi;</p> <p>Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal;</p> <p>Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;</p> <p>Meningkatkan kemampuan uji klinik.</p> <p>Industri Alat Kesehatan</p> <p>Mengembangkan kebijakan yang mengkaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang;</p> <p>Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas</p>
--	---	--

		<p>dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);</p> <p>Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;</p> <p>Mengembangkan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong;</p> <p>Mendirikan center of excellent yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;</p> <p>Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian;</p> <p>Memfasilitasi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesian dan alat pengukuran;</p> <p>Mengembangkn standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;</p> <p>Mengembangkan dan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan</p>
--	--	---

		teknis dan peralatan uji.
3	<p>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA</p> <p>Industri Tekstil: Serat tekstil, Rajut, Garmen fashion, Tekstil Khusus.</p> <p>Industri Kulit dan Alas Kaki: Alas kaki, Produk kulit khusus, Kulit sintetis, bahan kulit non-konvensional.</p> <p>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu: Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furniture kayu dan rotan</p> <p>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet: Plastik untuk keperluan umum, karet untuk keperluan umum, dan karet untuk keperluan khusus (antara lain: untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)</p>	<p>Industri Tekstil</p> <p>Pendirian pabrik serat sintetik yang berorientasi pasar domestik & ekspor (dengan pengutamakan kebutuhan domestik;</p> <p>Pengembangan industri pewarna tekstil dan aksesoris;</p> <p>Perumusan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap;</p> <p>Pengembangan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</p> <p>Penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil;</p> <p>Peningkatan kemampuan, kualitas & efisiensi industri TPT termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;</p> <p>Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil;</p> <p>Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi;</p> <p>Pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi</p>

		<p>tinggi;</p> <p>. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;</p> <p>. Pengembangan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri;</p> <p>. Pengembangan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya;</p> <p>. Pengembangan standarisasi & perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual design produk tekstil;</p> <p>. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil.</p> <p>Industri Kulit dan Alas Kaki</p> <p>Pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri;</p> <p>Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;</p> <p>Pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional;</p> <p>Penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan</p>
--	--	--

		<p>teknologi;</p> <p>Peningkatan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global;</p> <p>Perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;</p> <p>Peningkatan promosi industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia;</p> <p>Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (wet blue);</p> <p>Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan bak terkait persyaratan kesehatan hewan;</p> <p>.Pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;</p> <p>.Penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR;</p> <p>.Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki;</p> <p>.Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IAK dan IPK untuk</p>
--	--	--

		<p>meningkatkan kualitas dan efisiensi;</p> <p>.Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;</p> <p>.Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya.</p> <p>Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu</p> <p>Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK)</p> <p>Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.</p> <p>Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk</p> <p>Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture.</p> <p>Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb)</p> <p>Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk</p>
--	--	---

	<p>meningkatkan kinerja ekspor furnitur</p> <p>Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri</p> <p>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet</p> <p>Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum.</p> <p>Memfasilitasi penelitian dan</p> <p>Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.</p> <p>Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib</p> <p>Pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM. pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet</p> <p>Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir</p>
--	---

4	<p>INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI</p> <p>Industri Kendaraan Bermotor: Komponen otomotif, Penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik, Perangkat transmisi (power train), Alat berat.</p> <p>Industri kereta api: Kereta diesel dan listrik</p> <p>Industri perkapalan: Kapal laut, Komponen kapal (mekanikal & elektronik), Perawatan kapal</p> <p>Industri kedirgantaraan: Pesawat terbang propeler, Komponen pesawat, Perawatan pesawat.</p>	<p>Pengembangan road map industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/ konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia;</p> <p>Penguatan sub sektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang;</p> <p>Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi;</p> <p>Pengembangan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang ijin transportasi darat, laut dan udara;</p> <p>Pengembangan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal;</p> <p>Pengembangan sistem untuk status</p>
---	--	--

		<p>legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman ;</p> <p>Pengembangan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar (fosil & non fosil) untuk penggerak mula ;</p> <p>Pengembangan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi;</p> <p>Pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas);</p> <p>.Pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi;</p> <p>.Penguatan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;</p> <p>.Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;</p> <p>.Pengembangan komponen logam</p>
--	--	---

		<p>terstanda untuk efisiensi industri alat transportasi;</p> <p>.Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>.Pengembangan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk dan SDM;</p> <p>.Pengembangan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi;</p> <p>.Penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien ;</p> <p>.Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor.</p> <p>.Pengembangan design center industri alat transportasi.</p>
--	--	---

5	<p>INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (ICT)</p> <p>Industri Elektronika: Smart home appliances, Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ fabless)</p> <p>Industri Komputer: Komputer</p> <p>Industri Peralatan Komunikasi: Transmisi telekomunikasi, Smart mobile phone.</p>	<p>Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan competitive intelligence di negara maju;</p> <p>Pengembangan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT;</p> <p>Pengembangan standardisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien;</p> <p>Pengembangan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai user), cerdas (smart) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan;</p> <p>Pengembangan center of excellent industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan hankam;</p> <p>Pengembangan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi;</p> <p>Fasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju;</p> <p>Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk</p>
---	--	---

		<p>keperluan komersial dan pertahanan; Pengembangan industri radar dan satelit, termasuk stasiun relay; .Fasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk foundry); .Pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno-park) mikro- elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT; .Peningkatan kemampuan dan peran IKM penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi; .Fasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; .Pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT. .Pengembangan industri pemesinan mikro (micro machining).</p>
6	INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI Industri Alat Kelistrikan: Motor/generator listrik, Baterai, Solar cell	<p>Pengembangan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (energy balance); Pemetaan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk</p>

	<p>implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi;</p> <p>Pengembangan roadmap secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang;</p> <p>Pengembangan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber;</p> <p>Penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir;</p> <p>Fasilitasi pendirian pabrik/ pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet;</p> <p>Fasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;</p> <p>Fasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi;</p> <p>Falisitasi Penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat;</p> <p>.Pengembangan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari</p>
--	--

		<p>solar cell untuk menambah kapasitas daya listrik nasional;</p> <p>.Fasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri;</p> <p>.Pengembangan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi;</p> <p>.Pengembangan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi;</p> <p>.Pengembangan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien;</p> <p>.Pengembangan dan penguasaan teknologi design dan engineering untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan HKI dan penjaminan resiko teknologi;</p> <p>.Penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju;</p> <p>.Pengembangan teknologi produksi hidrogen dan fuel cell untuk penggerak mula di produk alat transportasi.</p>
--	--	--

7	<p>INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG DAN JASA INDUSTRI</p> <p>Industri Mesin dan Perlengkapan: Mesin CNC, Industrial tools, Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan</p> <p>Industri Komponen: Packaging (basis karton dan plastik), Pengolahan karet dan barang dari karet : Ban pnumatic, Ban luar dan ban dalam dll, Ban vulkanisir ukuran besar (Giant vulcanised tyre) (untuk pesawat dan offroad), Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif, Zat Additive, Zat pewarna tekstil (Dye stuff), plastik dan karet (pigmen), Bahan kimia anorganik.</p> <p>Industri Bahan Penolong: Katalis, Solvent</p> <p>d. Jasa Industri: Perancangan pabrik, Jasa proses industri, Pe</p>	<p>Industri Mesin dan Perlengkapan</p> <p>Kajian menyeluruh (integrated supply chain mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor;</p> <p>Penguatan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja, dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi;</p> <p>Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;</p> <p>Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan;</p> <p>Pengembangan dan penyediaan bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri tools;</p> <p>Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika;</p>
---	---	---

		<p>Peningkatan peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;</p> <p>Pengembangan komponen logam & bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya;</p> <p>Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian leasing;</p> <p>Industri Komponen dan Bahan Penolong</p> <p>Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik & karet engineering, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (dyes) dan pewarna plastik dan karet (pigment), serta bahan kimia anorganik.</p> <p>Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk plastik & karet engineering, katalis, zat aditif dan pewarna (dyes & pigment), serta bahan kimia anorganik.</p>
--	--	--

		<p>Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri Packaging (berbasis karton dan plastik), plastik & karet engineering, zat aditif, dye stuff, pigment, katalis dan solvent, serta bahan kimia anorganik.</p> <p>Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fosfat, copper sulfat, Kalium hidroksida, sodium bisulfit, grade chemical alumina, zinc oksida, zinc klorida, kalsium karbonat, natrium karbonat, natrium klorida)</p> <p>Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong</p>
8	<p>INDUSTRI HULU AGRO</p> <p>Industri Oleofood: Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats.</p> <p>Industri Oleokimia: Asam lemak nabati, fatty alcohols fatty amine, methyl ester sulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals), Minyak atsiri, Isopropil palmitat (IPP), dan Isopropil Miristat (IPM), Asam stearat (stearic acid)</p> <p>Industri Kemurgi: Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME), Bioavtur (Bio jet fuel).</p> <p>Industri Pakan: Ransum dan suplemen</p>	<p>Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.</p> <p>Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri.</p> <p>Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu,</p>

	<p>pakan ternak dan aquaculture.</p> <p>Industri Barang dari Kayu: Komponen berbasis kayu (wood working, laminated & finger joint).</p> <p>Industri Pulp dan Kertas: Long fiber, Dissolving pulp</p>	<p>rotan dan furniture, serta perlindungan HKI.</p> <p>Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.</p> <p>Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi.</p> <p>Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi</p> <p>Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri.</p> <p>Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan Palm Oil Mill Effluent (POME) terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas</p>
9	<p>INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM</p> <p>Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar: Iron ore pellet, Lumps,</p>	<p>Memfasilitasi pembangunan pabrik iron ore pellet</p> <p>Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk pembuatan pabrik baru)</p>

<p>Fines, Sponge iron, Pig iron dan besi cor, Nickel Pig Iron, Ferronickel, Paduan besi (ferro alloy), Baja untuk keperluan khusus (special steel).</p> <p>Industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi: Alumina SGA dan Alumina CGA , Alumunium, Alumunium alloy, billet dan slab, Nickel matte, Tembaga katoda, Copper/Brass Sheet, Nickel Hydroxide, Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, Nugget Fe Ni.</p> <p>Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth), dan bahan nuklir: logam mulia, konsentrat, logam tanah jarang.</p> <p>Industri bahan galian non-logam: 1. Semen, Keramik, Kaca/gelas, Kaca/gelas Pharmaceutical Grade, Refractory, Zirkonia, zirkon silikat, bahan kimia zirkon, Zirkon Opacifier</p>	<p>kapur bakar dan cooking coal serta briket semi kokas</p> <p>Meningkatkan jumlah atau kapasitas blast furnace</p> <p>Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir besi dalam negeri sebagai bahan baku direct reduction furnace dan blast furnace</p> <p>Revitalisasi industri baja untuk efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan</p> <p>Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan bauksit menjadi alumina</p> <p>Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel atau nikel matte,</p> <p>Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi smelter tembaga dan smelter aluminium.</p> <p>Memfasilitasi pembangunan smelter tembaga tambahan dari yang sudah ada</p> <p>.Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan smelter tembaga</p> <p>.Meningkatkan kapasitas produksi industri steel making (slab, billet, HRC, CRC, besi beton, wire rod)</p> <p>.Peningkatan kapasitas produksi Pengecoran (casting), Ekstrusi</p>
---	---

		<p>(extrusion), Penempaan (forging), Penarikan (wire drawing), Penggilingan (rolling) besi dan paduannya serta bukan besi dan paduannya</p> <ul style="list-style-type: none"> .Memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (special steel) termasuk baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat .Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agroindustri .Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia .Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi. .Penerapan industri hijau 18. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri .Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi .Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang
10	<p>INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA</p> <p>Industri Petrokimia Hulu: Etilena, Propilena, Butadiene, P-xylena, Metanol,</p>	<p>Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan</p>

<p>Ammonia.</p> <p>Industri Kimia organik: Carbon black, Asam Tereftalat, Asam Asetat, Akrilonitril, Bis Fenol A.</p> <p>Industri Pupuk: Pupuk tunggal (basis nitrogen), pupuk majemuk.</p> <p>Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik: Low-density polyethylene (LDPE), High-density polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Nilon, Polyethylene terephthalate (PET), Akrilik, Polyvinyl Chloride (PVC)</p> <p>Industri Karet Alam dan Sintetik: Butadiene Rubber (BR), Styrene Butadiene Rubber (SBR), Engineering natural rubber compound</p> <p>Industri Barang Kimia lainnya: Propelan</p>	<p>Kalimantan Selatan, bahan baku shale gas di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.</p> <p>Pengembangan produk aromatik di Tuban dan Cilacap</p> <p>Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi.</p> <p>Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi.</p> <p>Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll)</p> <p>Menyiapkan SDM lokal yang kompeten.</p> <p>Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, methanol to olefin)</p>
--	--

		<p>Optimalisasi penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional</p> <p>.Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia.</p> <p>.Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik</p> <p>.Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir.</p> <p>.Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku.</p> <p>.Mendorong pengembangan industri intermediate untuk bahan baku industri</p>
--	--	---

3.3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
6. Meningkatkan perlindungan konsumen
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi 8: logistic
8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

3.3.3 PRIORITAS NASIONAL BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 adalah “meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa” melalui:

- a. Peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional; serta
- b. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui 4 (empat) pilar strategi yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*), Strategi yang akan ditempuh:
 - a. Meningkatkan kemampuan diplomasi perdagangan
 - b. Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri
2. Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*), strategi yang akan ditempuh:
 - a. Memanfaatkan kerjasama perdagangan yang ada dan meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral;
 - b. Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri;

- c. Meningkatkan Promosi ekspor.
 - d. Meningkatkan pemanfaatan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global yang menghasilkan barang dan jasa berorientasi ekspor
3. Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*), Strategi yang akan ditempuh:
- a. Meningkatkan efektivitas *market intelligence*.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon eluportir atau eksportir pemula.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi Informasi mengenai produk potensial
 - d. Meningkatkan daya saing produk nasional.
 - e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas.
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*)
- a. Meningkatkan efektivitas manajemen impor.
 - b. Mengoptimalkan fasilitas *safeguards* dan pengamanan perdagangan lainnya.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Free Trade Agreements (FTA) yang sudah dilakukan.
 - d. Meningkatkan upaya pemantauan produk dan jasa luar negeri yang berpotensi mengancam daya saing produk lokal di pasar domestik.
 - e. Meningkatkan fasilitasi impor untuk menjamin ketersediaan barang modal dan bahan baku untuk mendukung daya saing industri nasional.
 - f. Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif.

PRIORITAS NASIONAL BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah “**meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan**” melalui:

1. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistic rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat

mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;

2. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
3. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif.
6. Mendorong penggunaan produk domestik.
7. Meningkatkan perlindungan konsumen.
8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
10. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Mendorong pengembangan Sistem Rani Gudang dan Pasar Lelang.
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan prasarana penunjang perdagangan.

PROGRAM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka dilakukan program-program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan;

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Perdagangan.

Arah pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan adalah:

- a. Peningkatan pengelolaan perencanaan.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan yang profesional dan memiliki integritas.
- c. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
- d. Pembinaan administrasi dan pelayanan pelaksanaan tugas.
- e. Penyusunan perangkat dan pelayanan hukum Bidang Perdagangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan.
- f. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan di Kementerian Perdagangan.
- g. Pengelolaan pendidikan/ pelatihan fungsional dan teknis kemetrolagian dalam rangka melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kemetrolagian.
- h. Peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan persepsi positif Kementerian Perdagangan di mata publik.
- i. Koordinasi harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam rangka tercapainya koordinasi dan harmonisasi yang berkualitas di internal Kementerian Perdagangan.

Outcome yang diharapkan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan adalah: (1) meningkatnya dukungan kinerja layanan publik; (2) meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM sektor perdagangan; dan (3) meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN Kementerian Perdagangan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Arah pelaksanaan program ini adalah meningkatkan ketersediaan sarana dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan prasarana kerja aparatur.

3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan;

Program ini dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan internal pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan dan sasaran dari Kementerian Perdagangan dapat dicapai secara efektif, efisien, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Arah dari pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan adalah :

1. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kinerja aparatur Kementerian Perdagangan.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Outcome yang diharapkan dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan adalah : (i) terwujudnya dukungan teknis dan manajemen pengawasan yang prima kepada seluruh unsur Inspektorat Jenderal; (ii) meningkatnya kompetensi aparat pengawas yang profesional dan berintegritas; dan (iii) meningkatnya penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Perdagangan.

4. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah kajian kebijakan perdagangan dengan melakukan pengembangan SDM yang profesional, pengembangan kerjasama dengan lembaga riset didalam dan luar negeri, penyusunan analisis kebijakan perdagangan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, pengelolaan data dan informasi secara berkesinambungan, dan pengelolaan sistem jaringan TIK yang mudah diakses, Arah pelaksanaan program Pengkajian Kebijakan dan Informasi Perdagangan adalah :

1. Pengkajian dan pengembangann kebijakan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.
2. Pengkajian dan pncembangan kebijakan perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan.
3. Pengkajian dan pengembangan kebijakan kerjasama perdagangan internasional.
4. Pengambangan sistem informasi perdagangan.
5. Peningkatan tatakelola administrasi yang baik.

Outcome yang diharapkan dari program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan adalah meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan, meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian, tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan, tersedianya data dan informasi perdagangan yang tepat guna, serta tersedianya jaringan TIK yang stabil guna mendukung layanan publik dan internal Kementerian Perdagangan

5. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

Program ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri yang menitikberatkan pada pengembangan sistem distribusi nasional dan penguatan kelembagaan perdagangan.

Arah pelaksanaan program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah :

1. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
2. Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha perdagangan.
4. Pemberdayaan dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negari.
5. Pengembangan perdagangan dalam negeri.
6. Peningkatan tata kelola yang baik.

Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri.

6. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri;

Program ini dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing dan pengamanan pasar dalam negeri yang menitikberatkan pada pengembangan kebijakan dan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen.

Arah pelaksanaan program Peningkatan Perlindungan Konsumen adalah :

1. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan.
2. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen.
3. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar.
4. Peningkatan Tertib Ukur.
5. Peningkatan Pengawasan Mata Barang.
6. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah.
7. Peningkatan tata kelola yang baik.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perlindungan Konsumen adalah meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang peningkatan perlindungan konsumen

7. Peningkatan Perlindungan Konsumen;

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (trade facilitation), peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi, pengelolaan impor dan pengamanan perdagangan.

Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri:

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan.
2. Pengelolaan ekspor produk industry dan pertambangan.
3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor.
4. Pengelolaan impor.
5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar.
6. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah
7. Dukungan sector perdagangan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)
8. Peningkatan tatakelola yang baik

Outcome yang diharapkan dari program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa,

meningkatnya efektivitas pengelolaan impor, dan meningkatnya pelayanan dan kemdahan berusaha bidang perdagangan luar negeri.

8. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional;

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang menitik beratkan pada peningkatan diplomasi perdagangan dan pengamanan kebijakan terkait perdagangan di fora internasional.

Arah dari pelaksanaan program peningkatan Kerja sama Perdagangan Internasional adalah:

1. Peningkatan peran dan pemanfaatan hasil perdagangan internasional.
2. Peningkatan kerja sama perdaganga jasa.
3. Peningkatan kerja sama perdagangan multilateral.
4. Peningkatan kerja sama perdagangan internal dan eksternal ASEAN.
5. Peningkatan kerja sama perdagangan di foru APEC dan organisasi internasional lainnya.
6. Peningkatan kerja sama perdagangan Bilateral.
7. Peningkatan tatakelola yang baik.

Outcome yang diharapkan dari program peningkatan Kerja sama Perdagangan Internasional adalah pengembangan sector prioritas jasa yang berorientasi ekspor, penurunan hambatan tariff an non-tariff di Negara mitra, peningkatan implementasi hasil perundingan, pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, kepastian tindak lanjut dan peta kerja sama perdagangan internasional, dan peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional.

9. Pengembangan Ekspor Nasional;

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional dengan menitikberatkan [ada upaya pengembangan produk yang berdaya saing, promosi dan penyediaan informasi pasar yang akurat dan terpercaya.

Arah dari pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor ini adalah:

1. Pengembangan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor
2. Pengembangan promosi dan citra
3. Kerjasama pengembangan ekspor
4. Pengembangan produk ekspor

5. Pengembangan SDM bidang ekspor dengan meningkatkan kapasitas SDM eksportir dan calon eksportir
6. Pengembangan pasar dan informasi ekspor
7. Pengembangan ekspor daerah
8. Peningkatan tata kelola yang baik

Outcome yang diharapkan dari program pengembangan ekspor nasional adalah meningkatnya pertumbuhan barang ekspor nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, mempertahankan pasar utama dan meningkatkan penetrasi pasar ekspor terutama ke negara pasar prostektif

10. Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Program ini dilakukan untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi dan pasar komoditi yang efisien melalui optimalisasi pemanfaatan kegiatan resiko dan pembentukan harga bagi dunia usaha, peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem resi gudang dan peningkatan kapasitas pasar lelang dan pasar fisik terorganisir

Arah pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (PBK)
2. Peningkatan pelayanan hukum
3. Pengkajian dan pengembangan PBK, SRG, dan PL
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pasar Lelang (PL) dan sistem resi Gudang (SRG)

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung

sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment* [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu merupakan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu berfungsi sbb:

- a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial
- b. ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- c. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- d. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; *dan*
- e. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, berperan dalam perumusan kebijakan teknis

dibidang perindustrian dan perdagangan. Dengan adanya penentuan pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu, maka pembangunan pasar, pembangunan industri pengolahan (kecil, sedang dan besar), pengelompokan industri (kluster industri) di setiap kabupaten/kota juga harus memperhatikan penentuan pola tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (RTRW dan KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan isu - isu yang berkembang baik eksternal maupun internal yang menyangkut sasaran kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah – langkah untuk menjabarkan kebijakan yang harus sesuai dengan kebutuhan.

Unsur program dalam Revisi Rencana Strategis merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Prioritas perekonomian rakyat dan iklim usaha yang harus disikapi secara seksama dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu ini antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah.
2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
4. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer (pertanian).
5. Masih rendahnya nilai tambah dan produktivitas UMKM.
6. Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil.
7. Tingkat investasi yang masih agak rendah.
8. Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif
9. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir. Perlu dikembangkan klaster industri di setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah
10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal

Pada tahun 2010, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%. Artinya ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD

Dari analisis permasalahan dalam bidang ekonomi secara komprehensif di provinsi Bengkulu, isu-isu strategis pembangunan bidang ekonomi adalah :

1. Adanya ketimpangan pembangunan dan perkembangan ekonomi antar Kabupaten/Kota
2. Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN masih sangat kecil sekali dan berfluktuasi
3. Masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat dan masih tingginya persentase penduduk miskin
4. Masih relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat
5. Bertambahnya tingkat pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja
6. Kenaikan harga barang-barang secara umum atau tingkat inflasi lebih tinggi dari pada nasional

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan gambaran pelayanan yang mencakup tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan beserta tantangan dan peluang yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, Untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sesuai arah pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Adapun Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu :

VISI :

“ Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

MISI :

1. Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
2. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
3. Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 TUJUAN

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan populasi dan persebaran industri
2. Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri

3. Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri
4. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sejalan dengan RPJMD Tahun 2016 – 2021, telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri yang diukur dari Nilai Investasi Sektor Industri dan Persentase peningkatan tenaga kerja industri.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Bengkulu.
4. Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor yang diukur dari Persentase Peningkatan nilai Ekspor, Nilai Ekspor dan Persentase penurunan nilai impor.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD sebagaimana terlampir.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang akan dicapai.

Sebagai penjabaran yang lebih akurat Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel : 4.2. di bawah ini :

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	<i>"Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan"</i>		
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi 2. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah 3. Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional 		
MISI I :	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran
Peningkatan populasi dan persebaran industri	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	<p>Strategi : Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat</p> <p>Arah Kebijakan : Pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	<p>Strategi : Penguatan Struktur Industri dengan terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri</p> <p>Arah Kebijakan : Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Investasi Sektor Industri 2. Persentase peningkatan tenaga kerja industri

MISI II : Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran
Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Strategi : Penguatan Pasar, Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Arah Kebijakan : Peningkatan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen	1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri 2. Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB
Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Strategi : Peningkatan Ekspor Non Migas yang bernilai Tambah Tinggi dan Pengembangan Ekspor Komoditi Daerah Arah Kebijakan : Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi dan Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Ekspor sektor prioritas daerah, Standarisasi Produk Lokal berorientasi Ekspor	1. Persentase Peningkatan nilai Ekspor 2. Nilai Ekspor 3. Persentase penurunan nilai impor
MISI III : Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran
Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Strategi : Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD dan Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Arah Kebijakan : Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik, Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan	1. Nilai Sakip 2. Nilai LPPD
	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi		1. Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP 2. Penerapan E-Government

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 45, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi ekonomi nasional tahun 2016 yang baik dengan memperhatikan indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi berhasil ditahan pada level 6,33%. Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perekonomian Indonesia, tentunya kita masih tetap harus optimis dalam menyongsong tahun-tahun yang akan datang dengan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Ekonomi Makro

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) provinsi Bengkulu yang tercermin pada pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Mencermati nilai PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga konstan terlihat bahwa nilai PDRB sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 selalu menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 2012 PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 32.363 juta rupiah, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 34.326,4 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 36.206,7 juta rupiah. Pada tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 terus meningkat menjadi 38.067,5 juta rupiah, dengan LPE provinsi Bengkulu, yaitu adalah sebesar 5,6% tahun 2009, kemudian meningkat menjadi 6,10% tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2011 menjadi sebesar 6,46%, kemudian meningkat menjadi sebesar 6,61% pada tahun 2012, dan sedikit terjadi penurunan pada tahun 2013 yakni menjadi sebesar 6,21 % dan begitu juga pada tahun 2014 terjadi penurunan lagi sebesar 0,72% sehingga Laju pertumbuhan ekonomi hanya tercapai sebesar 5,49%. Sedangkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 5,14%.

Sementara itu bila dilihat nilai PDRB harga konstan, maka tingkat pendapatan atau nilai riil PDRB perkapita penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 sebesar Rp. 18,143 juta dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 18,919 juta dan terus naik menjadi Rp. 19,626 juta pada tahun 2014. Selanjutnya terus meningkat menjadi sebesar Rp. 20.303 juta pada tahun 2015. Meningkatnya pendapatan per kapita provinsi Bengkulu baik menurut harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Meskipun nilai pendapatan per kapita provinsi Bengkulu mengalami peningkatan namun capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata perolehan pendapatan per kapita nasional.

Jika mencermati lebih jauh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2015 pada level kabupaten/kota, maka PDRB per kapita tertinggi adalah kabupaten Rejang Lebong Rp. 5.000 juta dan terendah Kabupaten Lebong sebesar Rp. 1,745 juta. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan pendapatan (*Income Disparity gap*) dan tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan kegiatan ekonomi, pendapatan per kapita serta pendapatan daerah maka pengeluaran per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 realisasi pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp. 5,3 juta, namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan (naik 28,30%) dalam pengeluaran per kapita menjadi Rp.6,8 juta. Selanjutnya pengeluaran per kapita terus meningkat menjadi Rp. 7,62 juta tahun 2013 dan menjadi Rp. 8,05 juta tahun 2014.

Realisasi Investasi (%)

Investasi yang ditunjukkan oleh indikator Pembentukan Modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu, selama periode 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 15,36 persen per tahun berdasarkan harga berlaku dan sebesar 9,48 persen berdasarkan harga konstan (BDA, 2014).

Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan daerah provinsi Bengkulu menunjukkan trend yang cenderung meningkat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2011 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.1,16 trilyun dan pada tahun berikutnya meningkat sangat signifikan sebesar 34,48% sehingga realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.1,56 trilyun dan pada tahun 2013 realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp.1,68 trilyun atau naik 7,69%. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah terus meningkat sehingga menjadi Rp.1,89 trilyun atau naik 12,50%.

Angka kemiskinan (%)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu sebesar 17,88% masih berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 11,22%. Dimana jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 334.070 jiwa dari total populasi. Angka ini meningkat 17.570 jiwa dari kondisi September 2014. Dalam target RPJMD 2010 – 2015 yang telah direvisi, target pencapaian angka kemiskinan Provinsi Bengkulu selalu berada dibawah target RPJMD atau dengan kata lain tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2015, target penurunan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu adalah berkisar antara 16,75% – 16,50%, sedangkan angka yang dicapai adalah hanya 17,88%, sehingga perlu diturunkan paling tidak sebesar 1,38% untuk mencapai target RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Dari analisis permasalahan dalam bidang ekonomi di provinsi Bengkulu, isu-isu strategis pembangunan bidang ekonomi adalah :

1. Adanya ketimpangan pembangunan dan perkembangan ekonomi antar Kabupaten/Kota
2. Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN masih sangat kecil sekali dan berfluktuasi
3. Masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat dan masih tingginya persentase penduduk miskin
4. Masih relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat
5. Bertambahnya tingkat pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja
6. Kenaikan harga barang-barang secara umum atau tingkat inflasi lebih tinggi dari pada nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Untuk Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Bengkulu

terpilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tanggal 09 Desember 2015 dan yang telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2016.

Dalam mendukung keberhasilan visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, maka disusunlah program dan kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran dan indikator kinerja dengan sumber pendanaan berasal dari Dana APBN dan APBD Provinsi Bengkulu.

Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, baik rutin maupun yang spesifik bidang perindustrian dan perdagangan, dirancang di awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan rutin adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
8. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
10. Publikasi Media Cetak dan Elektronik
11. Jaminan Asuransi Kesehatan Non PNS
12. Penyediaan Jasa Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Pengadaan Mebeler
6. Pembangunan Gedung Kriya Dekranasda
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
13. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Dekranasda
14. Master Pland, Study Kelayakan dan Penyusunan Perencanaan/DED Pasar Induk Provinsi Bengkulu
15. Penyusunan DED Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
5. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi OPD (PPID)
7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9. Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
10. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) OPD
11. Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2. Pengawasan Barang Berbahaya (B2)
3. Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)
4. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Provinsi Bengkulu
5. Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok
6. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
7. Peningkatan dan Pelayanan Kemetrolagian Daerah Bengkulu

8. Pembinaan terhadap usaha perdagangan dan perlindungan konsumen

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
2. Pemetaan dan Promosi Produk Unggulan Provinsi Bengkulu Melalui Media Online
3. Pembinaan Pelaku Usaha Calon Eksportir
4. Pendataan dan Monitoring Produk Unggulan Provinsi Bengkulu
5. Temu Pelaku Usaha
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium BPPMB
7. Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Daerah
8. Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor Impor)
9. Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu
10. Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu
11. Lomba Inovasi Khas Daerah
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Standarisasi
13. Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah
14. Workshop Bagi Pengusaha Pemula Bidang Ekspor Dan Import
15. Rapat Koordinasi Bagi Pelaku Ekonomi Provinsi Bengkulu

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2. Penyusunan Profil Pasar
3. Pembinaan Sarana Perdagangan Rakyat
4. Pembangunan Pusat Distribusi Pasar Provinsi
5. Pembuatan FS dan Master Plan Pusat Distribusi Pasar Provinsi
6. Penyajian Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
7. Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu
8. Penyusunan Profil Perdagangan Daerah
9. Pemantauan Distribusi Bahan Pokok

Program Persaingan Usaha

1. Penyusunan Kebijakan Persaingan Usaha di Provinsi Bengkulu
2. Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan Informal

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan Informal

2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
3. Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna

Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan di Sentra Industri
2. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
3. Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi
4. Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi Bengkulu
5. Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan
6. Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan
7. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2016

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi IKM (Kampung Nelayan)
2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
3. Fasilitasi kemudahan berusaha industri kecil dan menengah
4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
5. Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu
6. Pemuktahiran Data Base IKM
7. Pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil
8. Lomba Produk Hasil Kerajinan Khas Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Industri Agro

1. Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro
2. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro
3. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro dan Industri Pengolahan
4. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu
5. Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu
6. Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu
7. Pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil
8. Fasilitasi penyampaian data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)
9. Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir di Provinsi Bengkulu

Program Penataan Struktur Industri

1. Penyusunan Perencanaan/DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus
2. Penyusunan Master Pland Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus
3. Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Kluster Industri
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri
5. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra IKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1. *Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah*
2. *Bimbingan Teknis Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, IKM dan UMKM di Provinsi Bengkulu*

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1. *Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah*
2. *Peningkatan Mutu Kemasan Produk Bagi Koperasi*
3. *Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil*
4. *Penatausahaan Kelembagaan Koperasi*

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

1. *Pelatihan dan Bimbingan Teknis tentang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan*
2. *Pelatihan, Bimtek dan Pendampingan Tentang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan*
3. *Fasilitasi IKM/UMKM Dalam Mengikuti Pameran*
4. *Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu*
5. *Konfrensi Kopi Daerah*
6. *Lomba Inovasi Khas Daerah*

Adapun secara terukur rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang dalam **Tabel: 5.1** (terlampir).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sehubungan dengan adanya penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mengacu pada RPJMD Tahun 2016–2021 PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Namun, ada beberapa perbaikan nomenklatur indikator yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kementerian Dalam Negeri atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Walaupun demikian, pengukuran kinerjanya tetap menggunakan apa yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2016 – 2021 yaitu:

Sedangkan Indikator Kinerja pendukung dan merupakan indikator kinerja dari Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2016-2021 yaitu:

I. URUSAN PERINDUSTRIAN

- a. Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun
- b. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
- c. Nilai Investasi Sektor Industri
- d. Persentase peningkatan tenaga kerja industri

II. URUSAN PERDAGANGAN

- a. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri
- b. Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB
- c. Persentase Peningkatan nilai Ekspor
- d. Nilai Ekspor
- e. Persentase penurunan nilai impor

IKU dihitung mengikuti ketentuan pada Lampiran I Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Lebih rinci tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacupada Tujuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1(terlampir).

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu periode 2016-2021 ini dibuat sehubungan dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah dan Perubahan Pagu Dana dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional.

Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua bidang kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja, karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan yang terkait.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun dan kami sampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu untuk diverifikasi, masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Renstra ini untuk masa-masa yang akan datang.

LAMPIRAN

RENSTRA 2016-2021
Disperindag Prov. Bengkulu

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (sentra)	-	100%	-	2 Kab 5 Sentra	2 Kab 10 Sentra	2 Kab 15 Sentra	2 Kab 15 Sentra	2 Kab 20 Sentra	2 Kab 5 Sentra	2 Kab 10 Sentra	2 Kab 15 Sentra	2 Kab 15 Sentra	2 Kab 20 Sentra	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah IKM/ UKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	100%	-	700 IKM/UKM	820 IKM/UKM	825 IKM/UKM	830 IKM/UKM	835 IKM/UKM	700 IKM/UKM	820 IKM/UKM	825 IKM/UKM	830 IKM/UKM	835 IKM/UKM	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan	-	100%	-	5 Sentra 44 IKM	10 Sentra 50 IKM	15 Sentra 55 IKM	15 Sentra 60 IKM	20 Sentra 65 IKM	5 Sentra 44 IKM	10 Sentra 50 IKM	15 Sentra 55 IKM	15 Sentra 60 IKM	20 Sentra 65 IKM	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah UKM yang mendapat bantuan peralatan	-	100%	-	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	2000 UK	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Pelaku Usaha, UKM/ IKM yang mengikuti kegiatan expo/pameran	-	100%	-	23 Pelaku Usaha, UKM/IKM	185 Pelaku Usaha, UKM/IKM	190 Pelaku Usaha, UKM/IKM	195 Pelaku Usaha, UKM/IKM	200 Pelaku Usaha, UKM/IKM	23 Pelaku Usaha, UKM/IKM	185 Pelaku Usaha, UKM/IKM	190 Pelaku Usaha, UKM/IKM	195 Pelaku Usaha, UKM/IKM	200 Pelaku Usaha, UKM/IKM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan direvitalisasi	-	100%	-	10	60	61	60	63	10	60	61	60	63	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah kab/ kota yang konsumennya terlindungi	-	100%	-	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Bahan Berbahaya	-	100%	-	27 Kali	29 Kali	31 Kali	33 Kali	35 Kali	27 Kali	29 Kali	31 Kali	33 Kali	35 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kebijakan dan kerjasama dalam mendukung penataan struktur dan kemampuan teknologi industri guna pengembangan produk ekonomi unggulan di Kab/Kota	-	100%	-	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	100%	-	25 Org	74 Org	80 Org	90 Org	95 Org	25 Org	74 Org	80 Org	90 Org	95 Org	100%	100%	100%	100%	100%

PARAF KOORDINASI			
BAPPEDA		OPD	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		SEKRETARIS	
KABID PEREKONOMIAN DAN SDA		KASUBBAG PERENCANAAN	
KASUBBID			

**BENGKULU, OKTOBER 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**



**H. LIERWAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19610420 188512 1 001**

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.010.150.000	1.556.700.000	1.709.870.000	1.869.257.000	2.042.995.500	1.010.150.000	1.556.700.000	1.709.870.000	1.869.257.000	2.042.995.500							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000	50.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	24.800.000	24.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	150.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	322.914.800	150.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	322.914.800	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	254.786.960	254.786.960
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.150.000	210.000.000	225.000.000	240.000.000	265.000.000	137.150.000	210.000.000	225.000.000	240.000.000	265.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	215.430.000	215.430.000
Penyediaan ATK	100.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	100.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	210.000.000	210.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	30.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	30.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	196.000.000	196.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	20.000.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50.410.000	50.410.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20.000.000	22.000.000	25.000.000	27.000.000		20.000.000	22.000.000	25.000.000	27.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18.800.000	18.800.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	15.000.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000	15.000.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	22.400.000	22.400.000
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	220.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	220.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	274.000.000	274.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	288.000.000	300.000.000	320.000.000	340.000.000	360.000.000	288.000.000	300.000.000	320.000.000	340.000.000	360.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	321.600.000	321.600.000
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah		20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000		20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	22.000.000	22.000.000
Jaminan Asuransi Kesehatan Non Pns		29.700.000	32.670.000	35.937.000	39.530.700		29.700.000	32.670.000	35.937.000	39.530.700		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27.567.540	27.567.540
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305.000.000	19.969.500.000	1.976.250.000	917.825.000	1.014.007.500	305.000.000	19.969.500.000	1.976.250.000	917.825.000	1.014.007.500							
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		985.000.000	1.083.500.000				985.000.000	1.083.500.000				100,00%	100,00%			413.700.000	413.700.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500		82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76.576.500	76.576.500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.000.000	225.000.000	58.000.000			35.000.000	225.000.000	58.000.000			100,00%	100,00%	100,00%			63.600.000	63.600.000
Pengadaan Mebeler		200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000		200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	185.640.000	185.640.000
Penyusunan DED Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor																-	-
Pembangunan Gedung Dekranasda		10.000.000.000					10.000.000.000					100,00%				2.000.000.000	2.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor		1.000.000.000					1.000.000.000					100,00%				200.000.000	200.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	25.000.000	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	25.000.000	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	137.000.000	137.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	180.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	180.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	246.000.000	246.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	52.000.000	54.000.000	56.000.000	58.000.000	50.000.000	52.000.000	54.000.000	56.000.000	58.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	54.000.000	54.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	100.000.000	15.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60.000.000	60.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		7.000.000.000	-	-	-		7.000.000.000	-	-	-		100,00%				1.400.000.000	1.400.000.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	125.000.000	150.000.000	0	0	0	125.000.000	150.000.000	0	0							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			150.000.000					150.000.000					100,00%			30.000.000	30.000.000
Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)		75.000.000					75.000.000					100,00%				15.000.000	15.000.000
Outbond Disperindag		50.000.000					50.000.000					100,00%				10.000.000	10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	83.705.000	213.838.800	243.928.000	287.410.000	314.151.000	83.705.000	213.838.800	243.928.000	287.410.000	314.151.000							
Pendidikan dan Pelatihan Formal	83.705.000	113.838.800	133.928.000	167.410.000	184.151.000	83.705.000	113.838.800	133.928.000	167.410.000	184.151.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	136.606.560	136.606.560
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah		100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000		100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92.000.000	92.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	246.000.000	300.000.000	330.000.000	365.000.000	400.000.000	246.000.000	300.000.000	330.000.000	365.000.000	400.000.000							
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perindag Provinsi Bengkulu	190.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	190.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	248.000.000	248.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	56.000.000	75.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	56.000.000	75.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80.200.000	80.200.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	327.000.000	300.000.000	335.000.000	370.000.000	405.000.000	327.000.000	300.000.000	335.000.000	370.000.000	405.000.000							
Pemetaan dan Promosi Produk Unggulan Provinsi Bengkulu Melalui Media Online	327.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	327.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	215.400.000	215.400.000
Warta Informasi Ekspor dan Impor		150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000		150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	132.000.000	132.000.000
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	599.791.000	866.000.000	922.600.000	1.029.860.000	1.062.846.000	599.791.000	866.000.000	922.600.000	1.029.860.000	1.062.846.000							
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan di Sentra Industri	599.791.000	800.000.000	850.000.000	950.000.000	975.000.000	599.791.000	800.000.000	850.000.000	950.000.000	975.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	834.958.200	834.958.200
Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi		66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000		66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61.261.200	61.261.200
Program Penataan Struktur Industri	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0							
Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Kluster Industri		250.000.000					250.000.000					100,00%				50.000.000	50.000.000
Program Pengembangan Industri Agro	240.540.000	275.000.000	293.000.000	317.000.000	350.000.000	240.540.000	275.000.000	293.000.000	317.000.000	350.000.000							
Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro	155.540.000	185.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	155.540.000	185.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	202.108.000	202.108.000
Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro	85.000.000	90.000.000	93.000.000	97.000.000	100.000.000	85.000.000	90.000.000	93.000.000	97.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93.000.000	93.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	0	600.000.000	620.000.000	640.000.000	660.000.000	0	600.000.000	620.000.000	640.000.000	660.000.000							
Bimbingan Teknis dan Pendampingan Tentang Perindustrian dan Perdagangan		600.000.000	620.000.000	640.000.000	660.000.000		600.000.000	620.000.000	640.000.000	660.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	504.000.000	504.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	0	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	0	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000							
Pembinaan Pelaku Usaha Calon Eksportir		200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000		200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	190.000.000	190.000.000
Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	950.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	950.000.000							
Pembinaan dan Fasilitas Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	950.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	950.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	790.000.000	790.000.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	0	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000							
Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu		100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000		100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	140.000.000	140.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	786.760.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000	995.000.000	786.760.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000	995.000.000							
Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi IKM (Kampung Nelayan)	786.760.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000	995.000.000	786.760.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000	995.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	911.352.000	911.352.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	70.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	100.000.000	70.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	100.000.000							
Pengadaan Kemasan Susu	70.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	100.000.000	70.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85.000.000	85.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	742.791.000	2.827.361.200	2.900.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	742.791.000	2.827.361.200	2.900.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000							
Promosi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu	742.791.000	1.800.000.000	1.850.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	742.791.000	1.800.000.000	1.850.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.178.558.200	2.178.558.200
Event - Event Perindag		1.027.361.200	1.050.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		1.027.361.200	1.050.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.015.472.240	1.015.472.240
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	0	550.000.000	560.000.000	570.000.000	580.000.000	0	550.000.000	560.000.000	570.000.000	580.000.000							
Temu Pelaku Usaha		550.000.000	560.000.000	570.000.000	580.000.000		550.000.000	560.000.000	570.000.000	580.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	452.000.000	452.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0	500.000.000	550.000.000	666.360.800	725.000.000	0	500.000.000	550.000.000	666.360.800	725.000.000							
Lomba Produk Hasil Kerajinan Khas Provinsi Bengkulu		500.000.000	550.000.000	666.360.800	725.000.000		500.000.000	550.000.000	666.360.800	725.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	488.272.160	488.272.160
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	255.000.000	13.100.000.000	26.225.000.000	22.850.000.000	26.566.000.000	255.000.000	13.100.000.000	26.225.000.000	22.850.000.000	26.566.000.000							
Penyusunan Profil Pasar	255.000.000					255.000.000					100,00%					51.000.000	51.000.000
Pembinaan Sarana Perdagangan Rakyat		200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000		200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	190.000.000	190.000.000
FS dan Master Plan Pembangunan Pusat Distribusi Pasar Provinsi		500.000.000					500.000.000					100,00%				100.000.000	100.000.000
Pembangunan Pasar Desa/ Pasar Kalangan di Desa Tertinggal		12.400.000.000	12.600.000.000	22.600.000.000	26.291.000.000		12.400.000.000	12.600.000.000	22.600.000.000	26.291.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14.778.200.000	14.778.200.000
Pembangunan Pusat Distribusi Pasar Provinsi			13.400.000.000					13.400.000.000					100,00%			2.680.000.000	2.680.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	0	600.000.000	685.000.000	770.000.000	855.000.000	0	600.000.000	685.000.000	770.000.000	855.000.000							
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000		150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	150.000.000	150.000.000
Pendataan Sentra Barang Kebutuhan Pokok di Provinsi Bengkulu		150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000		150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	132.000.000	132.000.000
Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)		300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000		300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300.000.000	300.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	240.000.000	2.300.000.000	1.300.000.000	800.000.000	550.000.000	240.000.000	2.300.000.000	1.300.000.000	800.000.000	550.000.000							
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	240.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	240.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	398.000.000	398.000.000
Pengadaan Alat Laboratorium Uji dan Kalibrasi		2.000.000.000	900.000.000	300.000.000			2.000.000.000	900.000.000	300.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	640.000.000	640.000.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	126.200.000	265.000.000	280.000.000	295.000.000	310.000.000	126.200.000	265.000.000	280.000.000	295.000.000	310.000.000							
Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)	126.200.000	265.000.000	280.000.000	295.000.000	310.000.000	126.200.000	265.000.000	280.000.000	295.000.000	310.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	255.240.000	255.240.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	696.000.000	765.600.000	779.352.000	857.287.200	995.000.000	696.000.000	765.600.000	779.352.000	857.287.200	995.000.000							
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu	696.000.000	765.600.000	779.352.000	857.287.200	995.000.000	696.000.000	765.600.000	779.352.000	857.287.200	995.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	818.647.840	818.647.840
Program Pengembangan Industri Agro	286.400.000	600.000.000	450.000.000	500.000.000	600.000.000	286.400.000	600.000.000	450.000.000	500.000.000	600.000.000							
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu	286.400.000					286.400.000					100,00%					57.280.000	57.280.000
Penyusunan DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus		300.000.000					300.000.000					100,00%				60.000.000	60.000.000
Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu			450.000.000	500.000.000	600.000.000			450.000.000	500.000.000	600.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	310.000.000	310.000.000
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu		300.000.000					300.000.000					100,00%				60.000.000	60.000.000
JUMLAH	6.615.337.000	47.939.000.000	42.495.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	6.615.337.000	47.939.000.000	42.495.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	36.409.867.400	36.409.867.400

PARAF KOORDINASI		
BAPPEDA	OPD	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	SEKRETARIS	
KABID PEREKONOMIAN DAN SDA	KASUBBAG PERENCANAAN	
KASUBBID		

BENGKULU, OKTOBER 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. LUKRWAN, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19610420 188512 1 001

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AWAL
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PERINDUSTRIAN											
1	Peningkatan populasi dan persebaran industri	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	6,6%	14,3%	14,8%	14,9%	15,0%	15,2%	15,5%	15,5%
			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,70%	5,74%	6,2%	6,3%	6,5%	6,8%	7,0%	7,0%
2	Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	162,6 Milyar	169,3 Milyar	169,3 Milyar	176,5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar	206 Milyar
			Persentase peningkatan tenaga kerja industri	0%	12%	12%	12%	12%	13%	13%	13%
URUSAN PERDAGANGAN											
3	Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7,30	7,82	8,00	9,00	9,22	9,50	10,00	10,00
			Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13,35	13,88	14,00	14,10	14,50	14,75	15,00	15,00
4	Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor		4,09%	4,10%	4,25%	4,50%	4,75%	5,00%	5,00%
			Nilai Ekspor	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.350 Trilyun	1.407 Trilyun	1.475 Trilyun	1.545 Trilyun	1.622Trilyun	1.622Trilyun
			Persentase penurunan nilai impor		8,00%	6,00%	5,50%	5,30%	5,00%	4,75%	4,75%

Bengkulu, Oktober 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. LERWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19610420 198512 1 001

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Program Prioritas			
						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			3		URUSAN PILIHAN																				
			3 07		PERINDUSTRIAN																				
			3 07 01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
			3 07 1 01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			19.768.795.305		17.350.491.084		25.779.834.274		31.025.573.824		31.821.131.911		47.355.236.657		119.743.403.378					
					BELANJA TIDAK LANGSUNG	95 ORG	95 ORG	8.000.000.000	95 ORG	9.121.274.084	95 ORG	9.577.337.788	95 ORG	10.056.204.678	95 ORG	10.559.014.911	95 ORG	11.086.965.657	95 ORG	11.086.965.657	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
					BELANJA LANGSUNG			11.768.795.305		8.229.217.000		16.202.496.486		20.969.369.146		21.262.117.000		36.268.271.000		108.656.437.721					
Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	07 01 01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Adm Perkantoran yang Dilaksanakan	9 KEG	9 KEG	1.128.490.000	10 KEG	1.120.150.000	13 KEG	1.404.000.000	13 KEG	1.764.870.000	13 KEG	1.928.957.000	13 KEG	2.109.165.500	13 KEG	9.455.632.500	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat terkirim	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	129.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Jumlah Pembayaran selama 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	12 Bulan	292.820.000	12 Bulan	322.914.800	12 Bulan	1.443.934.800	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 07	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang dibayarkan	12 Org, 12 Bulan	12 Org, 12 Bulan	203.450.000	8 Org, 12 Bulan	137.150.000	12 Org, 12 Bulan	210.000.000	12 Org, 12 Bulan	225.000.000	12 Org, 12 Bulan	240.000.000	12 Org, 12 Bulan	265.000.000	12 Org, 12 Bulan	1.280.600.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 10	10	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang dibeli	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	950.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 11	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang tercetak dan Jumlah Dokumen yang digandakan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	870.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 01 12	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli	5 Gedung	5 Gedung	20.000.000	2 Gedung	20.000.000	8 Gedung	50.000.000	8 Gedung	55.000.000	8 Gedung	60.500.000	8 Gedung	66.550.000	8 Gedung	272.050.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	07 01 01 15	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang dibeli	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	127.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT			
		Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi	Nilai LPDP	07 01 01 18	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	300.040.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	1.750.040.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
	07 01 01 19			19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Honorar yang dibayarkan	20 Org	20 Org	300.000.000	15 Org	288.000.000	20 Org	384.000.000	15 Org	320.000.000	15 Org	340.000.000	15 Org	360.000.000	15 Org	1.992.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
07 01 01 20	20			Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	Jumlah Petugas Penatausahaan yang dibayarkan						12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	110.000.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
07 01 01 21	21			Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Frekuensi Publikasi Media Cetak dan Elektronik				10 Kali	50.000.000	12 Kali	50.000.000	12 Kali	55.000.000	12 Kali	60.500.000	12 Kali	66.550.000	12 Kali	282.050.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
			07 01 01 22	22	Jaminan Asuransi Kesehatan Non Pns	Jumlah Pegawai Non Pns yang Diberikan Jaminan Asuransi Kesehatan					20 Org	48.000.000	15 Org	32.670.000	15 Org	35.937.000	15 Org	39.530.700	15 Org	156.137.700	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
			07 01 01 23	23	Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah Jasa Kantor					6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	22.000.000	6 Jenis	24.200.000	6 Jenis	26.620.000	6 Jenis	92.820.000	DISPERINDAG	BENGKULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Program Prioritas		
						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)					
Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang	5 Unit	101 Unit	3.119.210.805	118 Unit	1.749.499.000	234 Unit	6.752.766.486	231 Unit	3.072.571.146	210 Unit	903.500.000	216 Unit	997.750.000	1115 Unit	16.595.297.437	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg Diadakan	-	-	-	-	2 Unit Mobil, 5 Unit Motor	985.000.000	2 Unit Mobil, 5 Unit Motor	1.083.500.000	-	-	-	-	-	4 Unit Mobil, 10 Unit Motor	2.068.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Diadakan	-	-	-	-	15 Unit	150.000.000	36 Unit	165.000.000	39 Unit	181.500.000	42 Unit	199.650.000	180 Unit	696.150.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
			07 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Diadakan	-	-	-	1 Paket	230.000.000	15 Unit	190.000.000	20 Unit	58.000.000	-	-	-	-	92 Unit	478.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 10	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler Kantor yang Layak dan Memadai yg Diadakan	-	-	-	-	15 Unit	100.000.000	30 Unit	110.000.000	30 Unit	121.000.000	30 Unit	133.100.000	120 Unit	464.100.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
			07 01 02 13	Pembangunan Gedung Kriya Dekranasda	Jumlah Gedung Kriya Dekranasda yang Dibangun	-	-	-	-	4 Unit	802.766.486	-	-	-	-	-	-	-	11 Unit	802.766.486	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dibuat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dibuat	-	-	-	-	-	5 Unit	1.110.071.146	-	-	-	-	-	-	5 Unit	1.110.071.146	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi	Nilai LPPD	07 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	5 Gedung	13 Unit	35.000.000	5 Gedung	224.499.000	8 Gedung	200.000.000	8 Gedung	160.000.000	8 Gedung	170.000.000	8 Gedung	180.000.000	8 Gedung	969.499.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	30 Unit	30 Unit	50.000.000	55 Unit	50.000.000	33 Unit	25.000.000	36 Unit	54.000.000	39 Unit	56.000.000	42 Unit	58.000.000	210 Unit	293.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	50 Unit	50 Unit	15.000.000	50 Unit	15.000.000	50 Unit	25.000.000	50 Unit	60.000.000	50 Unit	75.000.000	50 Unit	100.000.000	300 Unit	290.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yg Direhab Sedang/ Berat	3 Unit	3 Unit	2.859.182.028	-	-	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	6 Unit	2.859.182.028	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 43	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Dekranasda	Jumlah Gedung yg Direhab Sedang/ Berat	-	-	-	-	-	14 Unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	6 Unit	3.000.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 44	Master Pland, Study Kelayakan dan Penyusunan Perencanaan/DED Pasar Induk Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen /Perencanaan DED yang Dibuat	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	6 Unit	1.100.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 45	Penyusunan DED Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor	Jumlah Dokumen DED yang Dibuat	-	-	-	1 Tahun	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	400.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			07 01 02 46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	-	1 Paket	50.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	27.000.000	8 Gedung	149.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
			07 01 02 47	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4	-	-	3 Unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6 Unit	600.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT			
			07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Dihingatkan Disiplinnya	-	-	40.000.000	150 Org	-	150 Org	155.000.000	150 Org	-	-	-	150 Org	195.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT			
			07 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah SDM Aparatur yang Diadakan Pakaian Hari- Hari Tertentunya	-	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	-	-	150 Org	125.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT			
			07 01 03 07	Outbond Disperindag	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Outbond	-	-	40.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	150 Org	70.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT			
			07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Dihingatkan Kapasitasnya	15 Org	15 Org	28.950.000	25 Org	83.705.000	74 Org	50.000.000	80 Org	243.928.000	90 Org	287.410.000	95 Org	314.151.000	379 Org	1.008.144.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			15 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal	15 Org	15 Org	28.950.000	25 Org	83.705.000	34 Org	50.000.000	40 Org	133.928.000	50 Org	167.410.000	55 Org	184.151.000	219 Orang	648.144.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
			15 01 05 04	Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Bimtek Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	40 Org	110.000.000	40 Org	120.000.000	40 Org	130.000.000	160 Org	360.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Program Prioritas			
						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
						Kinerja	Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	07	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	80	80	80	90	92	95	95	95	95	4.359.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT					
							Nilai LPPD	80	80	85	88	90	92	92	4.359.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT							
							Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP	70 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	4.359.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT						
							Penerapan E-Government	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	4.359.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT						
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	10 Kab/Kota	5 program	300.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	275.000.000	1 Tahun	300.000.000	6 Tahun	1.365.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	-	-	13 Dok	10 Dok	56.000.000	10 Dok	75.000.000	10 Dok	80.000.000	10 Dok	90.000.000	10 Dok	100.000.000	60 Dok	401.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
							Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	14.500.000	1 Dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	34.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi	Nilai LPPD	07	01	06	09	Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi OPD (PPID)	Tersedianya Sistem Informasi dan Publikasi OPD	-	-	1 Tahun	100.000.000	-	-	-	-	6 Unit	100.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT				
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	12.500.000	-	-	-	-	-	-	5 Dok	12.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT				
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	13.500.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	13.500.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT				
								Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan	1 Dok	83.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	83.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT				
								Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) OPD	-	-	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	200.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
								Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag	-	-	90	150.000.000	92	750.000.000	93	750.000.000	95	500.000.000	97	2.150.000.000	DISPERINDAG	BENGGULU	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen	0	0	532.425.000	75 Persen	271.930.000	60 Persen	595.730.000	65 Persen	965.000.000	70 Persen	1.065.000.000	80 Persen	1.165.000.000	80 Persen	4.595.085.000	DISPERINDAG	Bengku
Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	07	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kab/kota yang diawasi	-	-	10 Kab/Kota	100.000.000	10 Kab/Kota	175.000.000	10 Kab/Kota	200.000.000	10 Kab/Kota	225.000.000	10 Kab/Kota	822.425.000	Disperindag	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan				
						Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	-	-	122.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pengawasan Barang Berbahaya (B2)	-	-	10 Kali	10.350.000	10 Kali	10.350.000	10 Kali	10.350.000	10 Kali	10.350.000	10 Kali	10.350.000	10 Kali	10.350.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan		
	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Negeri	07	01	15	06	Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)	Jumlah Bahan Berbahaya (B2) yang diawasi	-	-	5 Kab/Kota	115.850.000	11 Kali	50.000.000	12 Kali	280.000.000	13 Kali	295.000.000	14 Kali	310.000.000	60 Kali	1.050.850.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan	
							Operasional BPSK	-	-	10 kab/kota	10 kab/kota	200.000.000	4 Kali	350.000.000	4 Kali	400.000.000	4 Kali	450.000.000	4 Kali	1.545.730.000	Disperindag	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan		
							Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Provinsi Bengkulu	-	-	4 Kali	145.730.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	350.000.000	4 Kali	400.000.000	4 Kali	450.000.000	4 Kali	1.545.730.000	Disperindag	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan	
							Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Konsumen)	-	-	-	60%	65%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase peningkatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran	07	01	15	08	Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok	Frekuensi Monitoring Distribusi Bahan Pokok di 10 Kab/kota	-	-	4 Kali/Setahun	100.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen	180.000.000	4 dokumen	610.000.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan			
							Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	-	-	10 Kab/Kota	145.730.000	-	-	-	-	-	-	10 Kab/Kota	145.730.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan			
							Peningkatan dan Pelayanan Kemetrolgian Daerah Bengkulu	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan		
							Pembiinan terhadap usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	-	-	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000	DISPERINDAG	Bengku	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan		

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Program Prioritas						
						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)				
						Kinerja	Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)										
Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	07	01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Koefisien Stabilitas Harga	-	-	171.766.000	-	-	>10	500.000.000	>10	1.425.000.000	>10	2.270.000.000	>10	15.770.000.000	>10	20.787.766.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi			
			07	01	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7,30%	7,82%	-	-	-	8,00%	651.000.000	9,00%	-	1 Sarana	300.000.000	1 Sarana	500.000.000	1 Sarana	500.000.000	2 Sarana	1.300.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi
			07	01	18	10	Penyusunan Profil Pasar	Jumlah dokumen Profil Pasar di Provinsi Bengkulu yang tersusun	-	-	-	1 Dokumen	185.804.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	185.804.900	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
			07	01	18	11	Pembinaan Sarana Perdagangan Rakyat	Jumlah Kab/ Kota yang Dibina Dalam Rangka Memfasilitasi Pengembangan Sarana Perdagangan Rakyat	-	-	-	-	-	-	10 kab/kota	225.000.000	10 kab/kota	250.000.000	10 kab/kota	275.000.000	10 kab/kota	750.000.000	10 kab/kota	750.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
		07	01	18	13	Pembangunan Pusat Distribusi Pasar Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Pasar Provinsi yang Dibangun (Pasar Induk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Pasar	13.400.000.000	1 Pasar	13.400.000.000	1 Pasar	13.400.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi		
		07	01	18	14	Pembuatan FS dan Master Plan Pusat Distribusi Pasar Provinsi	Jumlah FS dan Master Plan yang dibuat	-	-	-	-	69.195.100	-	-	-	2 Dok	500.000.000	-	-	2 Dok	569.195.100	2 Dok	569.195.100	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi		
		07	01	18	15	Penyajian Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok	Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok	-	-	-	-	-	4 Kali/Sebulan	200.000.000	4 Kali/Sebulan	300.000.000	4 Kali/Sebulan	330.000.000	4 Kali/Sebulan	350.000.000	48 Kali/Bulan	1.180.000.000	48 Kali/Bulan	1.180.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
		07	01	18	16	Facilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu	Koefisien Stabilitas Harga	-	-	-	-	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10	-	>10	-	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
		07	01	18	17	Penyusunan Profil Perdagangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	-	-	-	10 kali	396.000.000	10 kali	300.000.000	12 kali	400.000.000	13 kali	440.000.000	14 kali	995.000.000	60 kali	2.531.000.000	60 kali	2.531.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
		Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	07	01	20	Program Persaingan Usaha	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7,30%	7,82%	-	8,00%	-	9,00%	-	9,22%	200.000.000	9,50%	250.000.000	10,00%	250.000.000	10,00%	700.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi	
07	01				20	01	Penyusunan Kebijakan Persaingan Usaha di Provinsi Bengkulu	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13,55%	13,88%	-	14,00%	-	14,10%	-	14,50%	-	14,75%	-	15,00%	-	15,00%	-	15,00%	-	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi
07	01				20	02	Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan Informal	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan dan Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim & Hilirisasi
Peningkatan populasi dan persebaran industri	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	07	01	21	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri	-	-	0	-	30 Persen	200.000.000	40 Persen	200.000.000	50 Persen	200.000.000	60 Persen	200.000.000	65 Persen	800.000.000	200.000.000	800.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
			07	01	21	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan teknis dibidang teknologi industri	-	-	-	-	10 IKM	200.000.000	10 IKM	200.000.000	10 IKM	200.000.000	10 IKM	200.000.000	40 IKM	800.000.000	40 IKM	800.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
		07	01	21	02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi	-	-	-	-	5 SDM	-	5 SDM	-	5 SDM	-	5 SDM	-	5 SDM	-	20 SDM	-	20 SDM	-	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
		07	01	21	05	Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna	Jumlah Pusat Layanan Teknologi Industri yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500.000.000	-	-	1 Paket	500.000.000	-	-	1 Paket	500.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Peningkatan populasi dan persebaran industri	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	07	01	21	Pengembangan Mesin Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Mesin Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	-	1 Mesin	500.000.000	1 Mesin	750.000.000	1 Mesin	1.000.000.000	3 Mesin	2.250.000.000	3 Mesin	2.250.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
			07	01	21	Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna	Jumlah Unit Usaha yang mengukuti restrukturisasi mesin peralatan berbasis teknologi	-	-	-	-	-	-	-	10 IKM	10 IKM	-	10 IKM	-	10 IKM	-	30 IKM	-	30 IKM	-	DISPERINDAG	Bengkulu	Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Program Prioritas				
						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
						Kinerja	Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)								
Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Persentase Peningkatan Usaha Industri	07	01	22	Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan	-	-	625.000.000	1 Sentra	1.458.582.000	3 Sentra	1.650.000.000	20 Sentra	2.450.000.000	20 Sentra	2.700.000.000	23 Sentra	2.350.692.000	79 Sentra	11.084.274.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	22	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan di Sentra Industri	Jumlah IKM/ Sentra yang mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-		5 sentra	8.582.000			15 sentra	850.000.000	15 sentra	950.000.000	20 sentra	975.000.000	65 sentra	2.783.582.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	07	01	22	02	Pembinaan dan Fasilitas Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu	Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui Dekranasda	-	-	475.000.000	6 IKM	900.000.000	6 IKM	950.000.000	6 IKM	800.000.000	6 IKM	900.000.000	6 IKM	950.000.000	30 IKM	4.975.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			07	01	22	03	Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi OVOP	-	-		1 Kali	100.000.000									1 Kali	100.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
		07	01	22	04	Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi Bengkulu	Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan OVOP	-	-		0	2 Kab	200.000.000	3 Kab/Kota	250.000.000	3 Kab/Kota	300.000.000	2 Kab/Kota	250.000.000	10 Kab/Kota	1.000.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
		07	01	22	05	Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan	Jumlah Wirusaha Baru Kelompok Nelayan	-	-		10 WUB	300.000.000	10 WUB	300.000.000	10 WUB	300.000.000	10 WUB	300.000.000	10 WUB	87.846.000	40 WUB	1.287.846.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
07	01	22	06	Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan	Jumlah Produk yang dikembangkan	-	-	150.000.000	1 Produk	200.000.000	3 Kali	250.000.000	3 Kali	250.000.000	3 Kali	250.000.000	3 Kali	87.846.000	15 Kali	937.846.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu			
					Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2016			150.000.000																		
Peningkatan populasi dan persebaran industri	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	07	01	23	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	6,56%	14,27%		14,80%	14,90%		15,00%	15,20%	15,50%	15,50%		15,50%	15,50%		15,50%	15,50%	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Nilai Investasi Sektor Industri	162,6 Milyar	169,3 Milyar			169,3 Milyar	176,5 Milyar		185 Milyar	195 Milyar		206 Milyar	206 Milyar											
			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	14.872 TK	16.141 TK			16.400 TK	16.761 TK		17.180 TK	17.644 TK		18.138 TK	18.138 TK											
			Jumlah Wirusaha Baru								5 WUB	5 WUB		5 WUB	5 WUB											
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	07	01	23	01	Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi IKM (Kampung Nelayan)	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan (Kampung Nelayan)			14 IKM	25.620.000			28 IKM	925.000.000	41 IKM	1.475.000.000	49 IKM	1.617.000.000	132 IKM	4.042.620.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	23	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat klaster industri							10 IKM	200.000.000	10 IKM	210.000.000	10 IKM	220.500.000	30 IKM	630.500.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	23	04	Fasilitasi kemudahan berusaha industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi kemudahan berusaha							10 IKM	100.000.000	10 IKM	105.000.000	10 IKM	110.250.000	30 IKM	315.250.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	23	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang difasilitasi kemitraan usaha dengan Usaha Besar							10 IKM	300.000.000	10 IKM	315.000.000	10 IKM	330.000.000	30 IKM	945.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	23	09	Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu	Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi Industri					10 IKM	150.000.000	15 IKM	150.000.000	20 IKM	200.000.000	25 IKM	250.000.000	70 IKM	750.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			07	01	23	10	Pemuktahiran Data Base IKM	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil																		
07	01	23	11	Pengembangan dan Pembinaan Wirusaha Baru Industri Kecil	Nilai Investasi Sektor Industri Kecil					100.000.000																
07	01	23	12	Lomba Produk Hasil Kerajinan Khas Provinsi Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Peserta Lomba									5 WUB	100.000.000	5 WUB	100.000.000	5 WUB	125.000.000	15 WUB	325.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
07	01	23	12	Lomba Produk Hasil Kerajinan Khas Provinsi Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Peserta Lomba									35 IKM	300.000.000	40 IKM	300.000.000	45 IKM	300.000.000	150 IKM	900.000.000	DISPERINDAG	Bengkulu	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan, Penguatan Komoditas Unggulan Agro - Maritim dan Hilirisasi, Visit 2020 Wonderful Bengkulu		

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	6,6%	14,3%	14,8%	14,9%	15,0%	15,2%	15,5%	15,5%
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,70%	5,74%	6,2%	6,3%	6,5%	6,8%	7,0%	7,0%
3	Nilai Investasi Sektor Industri	162,6 Milyar	169,3 Milyar	169,3 Milyar	176,5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar	206 Milyar
4	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	0%	12%	12%	12%	12%	13%	13%	13%
URUSAN PERDAGANGAN									
5	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7,30%	7,82%	8,00%	9,00%	9,22%	9,50%	10,00%	10,00%
6	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13,35%	13,88%	14,00%	14,00%	14,50%	14,75%	15,00%	15,00%
7	Persentase Peningkatan nilai Ekspor		4,09%	4,10%	4,25%	4,50%	4,75%	5,00%	5,00%
8	Nilai Ekspor	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.350 Trilyun	1.407 Trilyun	1.475 Trilyun	1.545 Trilyun	1.622 Trilyun	1.622 Trilyun
9	Persentase penurunan nilai impor		8,00%	6,00%	5,50%	5,30%	5,00%	4,75%	4,75%

Bengkulu, Oktober 2017
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI BENGKULU



H. LIERWAN, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19610420 198512 1 001

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
URUSAN PERINDUSTRIAN				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	6,56	14,27	14,8%	14,9%	15,0%	15,2%	15,5%	15,5%
			Nilai Investasi Sektor Industri Kecil	162,6 Milyar	169,3 Milyar	169,3 Milyar	176,5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar	206 Milyar
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan			5 Sentra	10 Sentra	15 Sentra	15 Sentra	20 Sentra	65 Sentra
		Program Pengembangan Industri Agro	Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-miqas besar sedang			6%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%
			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,18%	6,20%	6,25%	6,30%	6,50%	6,75%	7,00%	7,00%
		Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang	162,6 Milyar	169,3 Milyar	169,3 Milyar	176,5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar	206 Milyar	
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Persentase Peningkatan Usaha Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	14.872	16.141	16.400	16.761	17.180	17.644	18.138	18.138
			Jumlah Wirausaha Baru	-	-	2	2	1	1	0	6
	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri	-	-	-	2%	5%	10%	15%	20%
			Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi				5	10	15	20	50,00
	Program Penataan Struktur Industri	Kawasan Industri yang dibangun		-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah KPI, KI, dan Sentra IKM yang dikembangkan			-	-	-	-	-	1	-	1	

Bengkulu, Oktober 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. MERWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19610420 198512 1 001

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
URUSAN PERDAGANGAN				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen	-	-	-	60%	65%	70%	80%	80%
	Persentase peningkatan usaha Perdagangan		Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan	-	-	-	65%	70%	75%	85%	85%
	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Koefisien Kestabilan Harga Antar Waktu	-	-	-	>10	>10	>10	>10	>10
			Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7,30%	7,82%	8,00%	9,00%	9,22%	9,50%	10,00%	10,00%
Program Persaingan Usaha	Jumlah Kebijakan yang mengatur persaingan usaha	-	-	-	-	1	-	-	1		
Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB Persentase penurunan nilai impor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	-	-	3%	5%	7%	9%	10%	10%
			Nilai Ekspor	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.350 Trilyun	1.407 Trilyun	1.475 Trilyun	1.545 Trilyun	1.622Trilyun	1.622Trilyun
			Persentase penurunan nilai impor	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Jumlah Produk Lokal berstandar nasional dan berorientasi ekspor	-	-	3 Produk	5 Produk	7 Produk	10 Produk	15 Produk	15 Produk

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
URUSAN KELEMBAGAAN				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	-	-	80	82	85	90	95	95
	Nilai LPPD		Nilai LPPD	-	-	70	72	75	80	85	85
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi	Penerapan E-Government		Penerapan E-Government	-	-	-	-	50%	70%	80%	80%
			Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP	-	-	-	75%	80%	85%	90%	90%

Bengkulu, Oktober 2017
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROV: NSI BENGKULU



H. LERWAN SE
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19610420 198512 1 001

PENJABARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan
URUSAN PERINDUSTRIAN					
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Nilai Investasi Sektor Industri Kecil	Tersedianya data informasi perkembangan industri kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu	Pemuktahiran Data Base Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	Industri Kecil dan Menengah
				Nilai Investasi Sektor Industri Kecil	Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan	Meningkatnya fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pameran Penanggulangan Kemiskinan dan Ketertinggalan Yang Ada di Bengkulu Terutama Ditujukan Untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketertinggalan melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Keluarga Miskin Dan Pembentukan Wirausahawan Baru (Wub) Serta Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Lainnya. Meningkatnya fasilitasi peningkatan pengembangan produk IKM Terfasilitasinya peningkatan kemampuan sentra	Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu	Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui Dekranasda	Industri Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan SDM IKM dan UKM Kelompok Nelayan	Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan	Calon Wirausaha Baru
			Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan	Jumlah Produk yang dikembangkan	Industri Kecil dan Menengah
			Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi OVOP	10 Kab/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi Bengkulu	Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan OVOP	10 Kab/Kota

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan	
URUSAN PERINDUSTRIAN						
Program Pengembangan Industri Agro	Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang	Meningkatnya populasi industri sedang dan besar Hasil Hutan dan Perkebunan melalui hilirisasi produk pertanian menjadi agrobisnis	Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir di Provinsi Bengkulu (2019-2021)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Sawit Dan Kopi (Minyak Goreng, Margarine Dan Kopi Kemasan);	Industri Sedang/Besar	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Kelautan Perikanan (Nugget Ikan, Tepung Ikan Dsb) Serta Packaging Beras;		
	Jumlah Dokumen FS Industri Hilir Sawit Dan Kopi (Minyak Goreng, Margarine Dan Kopi Kemasan);					
	Jumlah Dokumen FS Industri Hilir Kelautan Perikanan (Nugget Ikan, Tepung Ikan Dsb) Serta Packaging Beras;					
	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya populasi industri makanan, Hasil Laut dan Perikanan melalui hilirisasi produk pertanian menjadi agrobisnis	Tersajinya data perkembangan industri di Provinsi Bengkulu	Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro	Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
					Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
	Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang	Meningkatnya populasi industri makanan, Hasil Laut dan Perikanan melalui hilirisasi produk pertanian menjadi agrobisnis	Terlaksananya penyampaian hasil pengolahan data industri sebagai informasi industri	Fasilitasi penyampaian data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Frekuensi Penyampaian hasil pengolahan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
					Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.	Jumlah Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.
Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang	Meningkatnya populasi industri makanan, Hasil Laut dan Perikanan melalui hilirisasi produk pertanian menjadi agrobisnis	Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan industri di Provinsi Bengkulu	Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen Perda RPIP Provinsi Bengkulu	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait	
				Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan
URUSAN PERINDUSTRIAN					
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	Tersedianya data informasi perkembangan industri kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu	Pemuktahiran Data Base Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
	Jumlah Wirusaha Baru	Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil Menengah	Pengembangan dan Pembinaan Wirusaha Baru Industri Kecil	Jumlah Wirusaha Baru yang dibina dan dikembangkan	Calon Wirusaha Baru
	Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi Industri		Lomba Produk Hasil Kerajinan Khas Provinsi Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Peserta Lomba	Industri Kecil dan Menengah
			Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu	Jumlah IKM yang Difasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk	Industri Kecil dan Menengah
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat kluster industri	Industri Kecil dan Menengah
			Fasilitasi kemudahan berusaha industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi kemudahan berusaha	Industri Kecil dan Menengah
			Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang difasilitasi kemitraan usaha dengan Usaha Besar	Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri	Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil Menengah	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan teknis dibidang teknologi industri	Industri Kecil, Menengah dan Sedang
	Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi		Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi		
	Jumlah KPI, KI, dan Sentra IKM yang dikembangkan		Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Pusat Layanan Teknologi Industri yang disediakan	
			Pengembangan Teknologi Industri Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Mesin Teknologi Tepat Guna Jumlah Unit Usaha yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan berbasis Teknologi	Industri Kecil, Menengah dan Sedang
Program Penataan Struktur Industri	Kawasan Industri yang dibangun	Terlaksanannya Perintisan dan Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra Industri kecil dan menengah	Penyusunan Perencanaan/ DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Perencanaan/ DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
	Jumlah KPI, KI, dan Sentra IKM yang dikembangkan		Penyusunan Master Plan Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Master Plan Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
			Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen FGD Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
			Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Kluster Industri	Jumlah Dokumen FS dan Master Plan Pembangunan Kluster Industri	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kluster Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan pada kluster industri	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
			Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra IKM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra IKM	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kluster Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan pada kluster industri	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar
			Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra IKM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra IKM	Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan	
URUSAN PERDAGANGAN						
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Provinsi Bengkulu	Operasional BPSK Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BPSK Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Konsumen)	10 Kab/Kota BPSK di 10 Kab/Kota Masyarakat	
			Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok	Frekuensi Monitoring Distribusi Bahan Pokok di 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang/Jasa Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan	10 Kab/Kota 80 Persen	
			Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)	Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) Jumlah Bahan Berbahaya (B2) yang diawasi	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Koefisien Kestabilan Harga	Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	Penyajian Informasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok	Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Koefisien Kestabilan Harga	Masyarakat	
			Penyusunan Profil Pasar	Jumlah dokumen Profil Pasar di Provinsi Bengkulu yang tersusun	Masyarakat	
			Pembinaan Sarana Perdagangan Rakyat	Jumlah Kab/ Kota yang Dibina Dalam Rangka Memfasilitasi Pengembangan Sarana Perdagangan Rakyat	Masyarakat	
			Pembangunan Pusat Distribusi Pasar Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Pasar Provinsi yang Dibangun (Pasar Induk)	Masyarakat	
			Pembuatan FS dan Master Plan Pusat Distribusi Pasar Provinsi	Jumlah FS dan Master Plan yang dibuat	Masyarakat	
			Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	Masyarakat	
	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri		Tersedianya Informasi Sub Sektor Perdagangan Daerah	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Sistem dan Informasi yang disediakan	Masyarakat
				Penyusunan Profil Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	Masyarakat, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
					Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	
					Persentase peningkatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran	

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan	
URUSAN PERDAGANGAN						
Program Persaingan Usaha	Jumlah Kebijakan yang mengatur persaingan usaha	Mewujudkan iklim persaingan usaha di Provinsi Bengkulu	Penyusunan Kebijakan Persaingan Usaha di Provinsi Bengkulu	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persaingan Usaha	Masyarakat, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait	
			Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan Informal	Jumlah Pelaku Usaha Pedagang Formal dan Informal yang dibina	Pedagang Formal dan Informal	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	Meningkatkan ekspor non migas Provinsi Bengkulu baik volume maupun nilai ekspor	Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Daerah	Jumlah Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Ekspor	Pelaku Usaha	
			Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor Impor)	Persentase Peningkatan nilai Ekspor Publikasi Informasi Ekspor dan Impor Provinsi Bengkulu	Masyarakat, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait	
			Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu	Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada Pameran Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi Jumlah Pelaksanaan Temu Bisnis antara Produsen, Eksportir dan Importir	Pelaku Usaha, Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait	
			Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Konferensi Kopi Daerah Jumlah Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu	Pelaku Usaha Kopi Bengkulu	
			Lomba Inovasi Khas Daerah	Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Khas Daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha Daerah	
	Jumlah Produk Lokal berstandar nasional dan beroirentasi ekspor		Memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah, Sub Regional dan Regional	Jumlah Partisipasi Aktif pada Forum Kerjasama Perdagangan Antar Daerah, Sub Regional dan Regional	Pelaku Usaha, Industri Kecil dan Menengah dan Industri Sedang/Besar, StakeHolder, Pemangku Kepentingan, Dinas/Instansi Terkait
				Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	Jumlah Komoditi Barang Ekspor dan Impor yang Diawasi Mutunya Jumlah Komoditi Barang Ekspor yang diuji dan distandarisasi Frekuensi Perawatan Laboratorium	Masyarakat dan Pelaku Usaha Daerah
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Standarisasi	Jumlah Sosialisasi laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Pengujian yang sudah Terakreditasi Jumlah SDM Penguji Mutu Barang yang bersertifikat dan kompeten Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	Masyarakat dan Pelaku Usaha Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium BPPMB	Jumlah alat lab diadakan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Daerah
				Persentase penurunan nilai impor	Menurunnya kontribusi impor barang konsumsi terhadap total impor	Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah

Program	Indikator Kinerja Program	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan
URUSAN KELEMBAGAAN					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Meningkatnya dukungan teknis kelembagaan dalam mendukung kinerja sektor perindustrian dan perdagangan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Program yang tersinkronisasi sesuai urusan	Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai LPPD		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	
			Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag	Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	
			Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	
			Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai SAKIP dan LPPD OPD	
			Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Tersedia	
			Penerapan E-Government	Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi OPD (PPID)	

Bengkulu, Oktober 2017
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI BENGKULU



H. ERWAN SE
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19610420 198512 1 001